

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

LAMPIRAN 2.2.1
2 (dua) Urusan

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	1	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	532 Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (di buat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.
		2	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	13.163 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Penerima Beasiswa PIP SMA Tahun 2021
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.339 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Penerima Beasiswa PIP SMK Tahun 2021



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	201.263 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Penerima dana BOS SMA Tahun 2021
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	103.016 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Penerima dana BOS SMK Tahun 2021
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	15 orang	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal	Jumlah minimal tenaga pendidik pada jenjang SMA memperhatikan: 1. Jumlah rombel 2. Kewajiban memenuhi beban mengajar 3. Jumlah mata pelajaran dalam struktur kurikulum
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	17 orang	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal	Jumlah minimal tenaga pendidik pada jenjang SMK memperhatikan: 1. Jumlah rombel 2. Kewajiban memenuhi beban mengajar 3. Jumlah mata pelajaran dalam struktur kurikulum
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	14.711 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	7.838 Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	6 orang	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	6 orang	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	2.533 TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	1.289 TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	D4/S1 =13854 Guru, Sertifikasi =4196 guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program diploma empat Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV)	D4/S1 =6910 Guru, Sertifikasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	=2201 guru	Provinsi NTT	
		16	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	D4/S1 =687 Kepsek, NUKS =134 Kepsek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		17	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	D4/S1 =228 Kepsek, NUKS =80 Kepsek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		18	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	21 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		19	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	20 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		20	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	218 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		21	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah	70 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	SMA/ sederajat		Provinsi NTT	
		22	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	28 SLB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal, dan Pendidikan Khusus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi baik A, B atau C (dibuat terpisah) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		23	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	727 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Penerima Beasiswa PIP SMK Tahun 2021
		24	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.679 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Penerima dana BOS SLB Tahun 2021
		25	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	12 orang	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal	Jumlah minimal tenaga pendidik pada jenjang SMK memperhatikan: 1. Jumlah rombongan belajar 2. Kewajiban memenuhi beban mengajar 3. Jumlah mata pelajaran dalam struktur kurikulum



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		26	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	685 sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		27	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	8 orang	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal	
		28	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	208 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		29	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	533 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program-program diploma empat Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional
		30	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	D4/S1 =24 Kepsek, NUKS =4 Kepsek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		31	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	52 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
2	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	4.492 Objek yang terdiri dari: 1. 479 Kesenian Asli Daerah 2. 4.013 buah (WBTB. 320, Ritual Adat 1134, Permainan Rakyat. 387, Cerita Rakyat. 741, Pengetahuan Tradisional. 746, Teknologi Tradisional. 498, Olahraga Tradisional. 78, Sejarah Pejuang Lokal. 87, Sejarah Pemerintahan Tradisional. 22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	1. Dokumentasi Visualisasi Kesenian Asli Daerah di 2 Lokasi yaitu Kab. Lembata dan Kab. Rote Ndao (<i>Refocusing</i>) 2. Dokumentasi Visualisasi Upacara Ritual Adat di 2 Lokasi yaitu Kab. Belu dan Kab. Rote Ndao (<i>Refocusing</i>) 3. Pendokumentasian Ritual Adat Kabupaten Ende (<i>Refocusing</i>) 4. Pembuatan Buku Cerita Rakyat (<i>Refocusing</i>) 5. Kajian dan Pendokumentasian Karya Budaya (Mendukung WBTB) 6 Kabupaten/ Kota (<i>Refocusing</i>) - Ditetapkannya Karya Budaya Tarian Ja'i sebagai Salah satu warisan Budaya Tak Benda Indonesia Berdasarkan Sertifikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0010/F4/KB.04.04/2021 Tanggal 7 Desember 2021
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	4 judul Buku yang terdiri dari: 1. 2 judul buku (2 Lokasi) 2. 2 judul Buku (2 Lokasi)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	1. Pengkajian dan Seminar Bahasa Daerah (Bahasa Ende dan Bahasa Mbay) di 2 Kabupaten (Ende dan Nagekeo) 2. Pengkajian dan Seminar Sejarah Pejuang Lokal (Kudang Laiskodat dan Letnan Don



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Gaspar Da Costa) di 2 Lokasi (Kab. Kupang dan Kota Kupang)
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	74 Orang/ CB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Juru Pelihara Cagar Budaya Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Provinsi.
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	50 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT (Bidang Kebudayaan)	1. Audisi Gita Bahana Nusantara. Dari hasil audisi Dinas PK mengirimkan 4 Orang untuk mewakili ke Tingkat Nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara Virtual baik Tingkat Provinsi maupun Nasional 2. Workshop Tenun Ikat sebanyak 30 Orang berlokasi di Kota Kupang (<i>Refocusing</i>) 3. Tenun Ikat Pelajara dan Flobamorata Fashion Carnival sebanyak 80 Orang berlokasi di Kota Kupang. <i>Refocusing</i> 4. Festival Kesenian Daerah Tk. Provinsi sebanyak 264 Orang berlokasi di Kota Kupang (<i>Refocusing</i>) 5. Bimbingan Teknis Juru Pelihara Cagar Budaya Sebanyak 74 Orang berlokasi di Kota Kupang (<i>Refocusing</i>) 6. Bimbingan Teknis Pengelola Museum Sebanyak 22 Orang yang berlokasi di Kota Kupang (<i>Refocusing</i>) 7. Jejak Tradisi Sebanyak 50 Orang di Kabupaten TTS (<i>Refocusing</i>)



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	895 CB (ditetapkan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Melakukan Inventarisasi Data Cagar Budaya Yang Berada di 22 Kabupaten/Kota.
		6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	10 lokasi CB/Rumah Adat di 9 Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Revitalisasi Rumah Adat/Kampung Adat di 9 Kabupaten yaitu Kab. Sumba Barat, Flores Timur, Lembata, Kota Kupang, Alor, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, TTS dan Ngada (<i>Refocusing</i>)
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi	--	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Tidak ada pengajuan dari perorangan/lembaga pemerintah/swasta untuk membawa Benda CB ke luar Provinsi.
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	1 lokasi CB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ekskavasi Lanjutan pada Kawasan Situs Nuat Bkai (Hunian Manusia Prasejarah)
		9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	73 buah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Lokasi Obyek Cagar Budaya Yang Dibiayai Oleh Pemerintah Provinsi
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	7.453 buah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Tahun 2021 Koleksi Museum bertambah 2 Koleksi dari hasil Hibah Benda Koleksi Ke Museum NTT menjadi 7.453 Koleksi
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	8.536 Pengunjung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Tahun 2021 Jumlah Pengunjung Museum NTT yang datang Ke Museum Sebanyak 1.929 orang dan Pengunjung Museum secara Virtual pada kegiatan-kegiatan Museum sebanyak 6.607 Orang melalui akses media sosial Facebook Museum NTT



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan Youtube Museum Daerah NTT
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum	5 kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	1. Kegiatan Seminar Kajian Kain Tenun TTU dan Kajian Koleksi Kab. Alor; 2. Kegiatan Pameran Museum Temporer Permainan Tradisional dan Pameran Perburuan secara Tradisional; 3. Kegiatan Sosialisasi Informasi Koleksi Kain Tenun Ikat/Songket dan Tradisi Penangkapan Nyale pada Masyarakat Agraris di Kab. Sumba Barat; 4. Kegiatan Lomba Karya Tulis Museum Tentang Alat Musik Tradisional di NTT; 5. Kegiatan Belajar Bersama di Museum Tentang Cerita Dongeng Benda Koleksi, Melukis Mural Tentang Koleksi Museum NTT.
		13	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Tidak perlu diisi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
		14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	8 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Tahun 2021 dibentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
		15	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	7 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Tahun 2017 dibentuk Tim Tenaga ahli
		16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	--	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	• Berdasarkan ketentuan Dirjen Kebudayaan TACB harus mengikuti Sertifikasi TACB (Surat Nomor 0899/F.F4/KB/2020; • Tahun 2021 telah dianggarkan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							TACB Prov. NTT untuk mengikuti Sertifikasi Mandiri Tingkat Nasional, namun hanya terakomodir Biaya Perjalanan TACB ke Jakarta, sedangkan biaya pelaksanaan sesuai ketentuan yang dibuat LSP P2 Kebudayaan tidak terakomodir. Saat ini anggaran untuk Sertifikasi TACB <i>direfocusing</i>.
		17	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum	5 orang (CB) 35 orang (museum)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sumber Daya Manusia di UPTD Museum NTT Tahun 2021 sebanyak 40 orang terdiri dari : 1 Kepala UPTD Museum 1 Kepala Seksi Bimbingan dan Edukasi 5 Orang Edukator 2 Orang bagian Perpustakaan 1 Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi 2 Orang Kurator 1 Orang Register 2 Orang Konservator 1 Orang Preparator 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3 orang Pengadministrasian Kepegawaian 3 orang Pengadministrasi Umum 2 Orang Pengadministrasi Persuratan 1 orang Pengadministrasi Keuangan 1 orang Analis Keuangan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							- 6 orag Pramu Kebersihan - 2 orang Pramu Taman - 5 orang Petugas Keamanan
		18	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	24 orang (museum)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Tahun 2021 belum ada kegiatan terkait peningkatan Kompetensi SDM Museum
		19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	Data sarana dan prasarana (museum)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	
		20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	10 kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	1. Kegiatan Pengadaan Benda Koleksi Museum di Kab. Sumba Barat dan Malaka (<i>Refocusing</i>) 2. Kegiatan Pameran Museum Kain Tenun Tradisional Tingkat Nasional (<i>Refocusing</i>) 3. Kegiatan Pameran Museum Alat Musik Tradisional Tingkat Nasional (<i>Refocusing</i>) 4. Kegiatan Lomba Kreativitas Museum Tk. SMA/SMK di Kota Kupang (<i>Refocusing</i>) 5. Kegiatan Seminar Kajian Kain Tenun TTU dan Kajian Koleksi Kab. Alor 6. Kegiatan Pameran Museum Temporer Permainan Tradisional dan Pameran Perburuan secara Tradisional 7. Kegiatan Sosialisasi Informasi Koleksi Kain Tenun Ikat/Songket dan Tradisi Penangkapan Nyale pada Masyarakat Agraris di Kab. Sumba Barat



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							8. Kegiatan Lomba Karya Tulis Museum Tentang Alat Musik Tradisional di NTT 9. Kegiatan Belajar Bersama di Museum Tentang Cerita Dongeng Benda Koleksi, Melukis Mural Tentang Koleksi Museum NTT 10. Kegiatan Kajian Koleksi Kain Tenun di Kab. TTU



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Kesehatan
2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Pengendalian Penduduk dan KB

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 Rumah sakit Prof. Dr. WZ. Johannes Kupang	ASPAK	Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional, RS Rujukan Provinsi di NTT berjumlah 1 (RSUD Johannes Kupang) dan sudah memenuhi SPA sesuai standar (nilai ASPAK >60%)
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	0 Rumah sakit	Laporan Seksi Yankes Rujukan	Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.01/MENKES/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-19, maka segala kegiatan persiapan dan survei akreditasi ditiadakan, fasilitas pelayanan kesehatan yang masa akreditasinya berakhir otomatis diperpanjang sampai 1 tahun setelah status COVID-19 sebagai bencana nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	757 jenis (obat, vaksin, perbekalan kesehatan)	Laporan Mutasi Obat, vaksin dan Perbekalan Kesehatan Th. 2021	
		4	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	108 unit	Laporan Seksi Yankes Rujukan	54 Pos Kesehatan di titik pengungsian dan 54 RS yang melakukan pelayanan COVID-19
		5	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	2158 SDM Kesehatan	Lap. Seksi PSDMK Tahun 2021 Dinkes Dukcapil Prov. NTT	SDM Kesehatan ini adalah SDM Kesehatan yang berada di Prov. NTT yang menangani COVID-19
		6	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	31 orang	Laporan Seksi Yankes Rujukan	Sesuai SK Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek.2334/050/IX.2021 tentang Tim Klaster Kesehatan Dalam Penanggulan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
		7	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	0	Laporan Seksi Yankes Rujukan	Pada tahun 2021 direncanakan kegiatan edukasi pengurangan resiko kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (tahap pra kisis bencana), dengan sasaran 44 desa di Kabupaten/Kota, bersumber dana APBD Provinsi NTT, namun tidak terlaksana karena refocusing kegiatan.
		8	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	757 jenis (obat, vaksin, perbekalan kesehatan)	Lap Mutasi Obat, vaksin dan Perbekalan kes. Th. 2021	Sumber Data, sama dengan no. 2



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	20 orang	Laporan Seksi Yankes Rujukan	Sesuai SK Kepalka Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dinkes. Yankes.03a/879/I/2020 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan
		10	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	Kelengkapan : 92 % ketepatan : 82% Respon Alert : 86% -	Laporan SKDR Seksi Survim	Tidak ada datanya karena kondisi sekarang berdasarkan situasi SKDR saja. Karena tergambar peningkatan kasus yg mengarah ke KLB, dalam SKDR memuat semua kasus yg berpotensi KLB.
2.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	Fasilitasi pelayanan Adminduk	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan adminduk dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	Laporan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Thn 2021	
3.	Pengendalian Penduduk dan KB	12	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada/tidak		Perwakilan BKKBN NTT	Kabupaten TTU, Nagekeo dan Provinsi telah menyusun Draf GDPK namun belum di PERDakan
		13	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	23,3	Pk21	
		14	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_{if} \times k}$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	20.04	Pk21	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		15	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$	71,65	Pk21	Informasi KB dari penyuluh KB/PLKB kepada masyarakat
		16	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	9	MoU	IBI, PKK, TNI, SINODE, GMIT, EUSKUPAN RUTENG, PRAMUKA, ORUM REKTOR INDONESIA.
		17	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$	90 %		
		18	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	41,1	Pk21	
		19	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	Tidak ada		Tidak ada dalam indikator BKKBN
		20	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$ KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari	24,9 %	Statistik Rutin BKBBN	
		21	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah	11	Pk21	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		22	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$ Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	63,56 %	Pk21	



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Pekerjaan Umum
2. Perumahan Rakyat
3. Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekerjaan Umum	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada	Dinas PUPR	Kawasan Permukiman yang ada tidak berada pada kawasan rawan banjir
		2	Panjang sungai di 23 kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Panjang sungai di 23 kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum dilakukan pendataan
		3	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada	Dinas PUPR	Sama dengan nomor 2
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada		Belum dilakukan pendataan
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/tidak	Tidak ada		Tidak dianggarkan
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/tidak	Tidak ada		Sama dengan nomor 5
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	6 lokasi: total: 299 meter, dengan lokasi: - Sungai Nain-TTU - Sungai Oesao dan Sungai Oepaha- Kab Kupang		(yang diberi warna merah yang dikerjakan) Data prasarana dan sarana pengaman pantai sungai milik pemerintah Provinsi yang diminta adalah : i. Bangunan Perkuatan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Sungai Mbepa- Kab. Ende - Sungai Melolo- Kab. S.Timur - Sungai Wanokaka- Kab.SumbaBarat.		i. Tebing (m) ii. Tanggul Sungai (m) iii. Kanal Banjir (m) iv. Pintu Air/ bendungan pengendali banjir (unit) v. Pompa Banjir (unit dan kapasitas) vi. Polder/kolam retensi (unit) vii. Breakwarter (m)
		8	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada		Sama dengan nomor 1
		9	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada		Sama dengan nomor 1
		10	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada		Sama dengan nomor 2
		11	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada		Belum dilakukan survey dan pendataan
		12	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada		Sama dengan nomor 4
		13	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada/tidak	Tidak ada		Sama dengan nomor 5
		14	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada/tidak	Tidak ada		Sama dengan nomor 5
		15	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Jumlah	(Bangunan Perkuatan tebing, khusus Sungai= 299 M)		- Sama dengan No. 7 - Tidak dibangun sarana prasarana pengaman pantai Data prasarana dan sarana



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Provinsi yang diminta adalah : i. Bangunana Perkuatan Tebing (m) ii. Tanggul Sungai (m) iii. Kanal Banjir (m) iv. Pintu Air/ bendungan pengendali banjir (unit) v. Pompa Banjir (unit dan kapasitas) vi. Polder/kolam retensi (unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman Pantai lainnya (m) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		16	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) Panjang jaringan irigasi primer (m) $\times 100\%$	43,23 %	Dinas PUPR	L = 77.530,70 m' Total : 179.348,14 m' - Perubahan terjadi akibat update data sesuai hasil Survey Kondisi dan Hasil SID tahun-tahun sebelumnya dan juga sudah termasuk panjang saluran yang direncanakan.
		17	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) Panjang jaringan irigasi sekunder (m) $\times 100\%$	37,68 %	Dinas PUPR	L = 200.303,52 m' Total : 531.642,34 m' - Perubahan terjadi akibat Abdate data sesuai hasil Survey Kondisi dan Hasil SID tahun-tahun sebelumnya dan juga sudah termasuk panjang saluran yang direncanakan.



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		18	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)Panjang jaringan irigasi tersier (m) $\times 100\%$	Tidak ada	--	Kewenangan Dinas Pertanian
		19	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada/tidak	3 Dokumen	Dinas PUPR	Sub Kegiatan:Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis SPAM
		20	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Ada/tidak	Tidak ada	Dinas PUPR	Baru Penyusunan Rencana
		21	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi	1	Dinas PUPR	Melayani Kota dan Kabupaten
		22	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	Dinas PUPR	Dinas PUPR Tidak mengeluarkan Izin (pada Prizinan satu Pintu)
		23	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	3	Dinas PUPR	Dengan PDAM Kota Kupang, PDAM Kab. Kupang dan UNDANA (Lampiran MOU)
		24	Jumlah SPALD Regional	Jumlah SPALD Regional	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada kegiatan
		25	Total kapasitas SPALD Regional	Total kapasitas SPALD Regional	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada kegiatan
		26	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada kegiatan
		27	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada kegiatan
		28	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Ada/tidak. Apabila ada, disebutkan jumlahnya	---	Dinas PUPR	Tidak ada



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		29	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	2.650 KM	Dinas PUPR	SK. Terlampir
		30	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Ada/tidak	Ada	Dinas PUPR	Road Map Jalan -Data terlampir
		31	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun	- Km	Dinas PUPR	Tidak ada Pembangunan Jalan Baru
		32	Panjang jembatan yg dibangun	Panjang jembatan yg dibangun	- M	Dinas PUPR	Tidak ada Anggaran
		33	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	528,35 Km	Dinas PUPR	37,13 Km (selsai) 491,22 Km –SMI – Multi Year
		34	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	Dinas PUPR	Tidak ada Anggaran
		35	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	16.73 Km	Dinas PUPR	
		36	Panjang jembatan yang direhabilitasi	Panjang jembatan yang direhabilitasi	-	Dinas PUPR	Tidak ada Anggaran
		37	Panjang jalan yang dipelihara	Panjang jalan yang dipelihara	16.73 Km	Dinas PUPR	Sama dengan No 35
		38	Panjang jembatan yang dipelihara	Panjang jembatan yang dipelihara	-	Dinas PUPR	Tidak ada Anggaran
		39	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	Tidak ada	LPJK Nasional	Sejak Ahir tahun 2020 LPJK Prov. Ditiadakan dan hanya ada LPJK Nasional. Pasal 40 Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020
		40	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Ada/tidak		LPJK Nasional	idem



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		41	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	-	LPJK Nasional	idem
		42	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	Tidak ada	LPJK Nasional	idem
		43	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provins	Ada/tidak	Tidak ada	LPJK Nasional	idem
		44	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada/tidak	Tidak ada		Sama dengan No. 43
		45	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/tidak	Tidak	LPJK Nasional	idem
		46	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada/tidak	Tidak	LPJK Nasional	idem
		47	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Ada/tidak	Tidak ada	LPJK Nasional	idem
		48	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada/tidak	Tidak ada	LPJK Nasional	idem
		49	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konsruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada/tidak	Tidak ada	LPJK Nasional	idem



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Perumahan Rakyat	50	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	Tidak ada	LPJK Nasional	idem
		51	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	Tidak ada	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas PUPR tidak mendata kecelakaan pada proyek
		52	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	Tidak ada	LPJK Nasional	idem
		53	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum dilakukan Survey dan pendataan
		54	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak ada	Dinas PUPR	Data rumah terkena Bencana di BPBD
		55	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak ada	Dinas PUPR	Data rumah terkena Bencana di BPBD
		56	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	Dinas PUPR	Data rumah terkena Bencana di BPBD
		57	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada Anggaran terkait rencana aksi
		58	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	Dinas PUPR	Dilaksanakan oleh BPBD dan Balai Perumahan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		59	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada	Dinas PUPR	Dilaksanakan oleh BPBD dan Balai Perumahan
		60	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada Data Bencana
		61	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak ada	Dinas PUPR	Data di BPBD
		62	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum dilakukan survey
		63	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada ganti rugi
		64	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada kegiatan
		65	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada		Sama dengan No.64
		66	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	61.71 Ha	Dinas PUPR	Data sementara sesuai dengan Review SK oleh 9 Kabupaten/Kota, sedangkan 13 Kabupaten lainnya sementara dilaksanakan review.
		67	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada penanganan karena refocusing
		68	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada penanganan karena refocusing



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Pertanahan	69	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	4 PSU	Dinas PUPR	Praimadita-Sumtim Kawasan Nasipanaf-Kab.Kpg Dintor-Waerebo-Manggarai Fatumnasi TTS
		70	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak ada	Dinas PUPR	(pada Dinas Perijinan satu Pintu)
		71	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Tidak ada	Dinas PUPR	Bukan kewenangan
		72	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak ada	Dinas PUPR	Bukan kewenangan
		73	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	$\frac{\text{Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan}}{100\% \times \text{Jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan}}$			
		74	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	Jumlah masalah yang diselesaikan	0%	Dinas PUPR	Hanya terdapat ,- Perpanjangan Penetapan Lokasi SK.No.134/KEP/HK/2021 ,- Penabahan jangka waktu penetapan Lokasi (2 Lokasi) ,- Perubahan lokasi pembangunan Bendungan Lambo ,- Delegasi kewenangan persiapan pengadaan tanah <i>Data terlampir</i>
		75	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	$\frac{\text{Jumlah Izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{100\% \times \text{Jumlah Permohonan Izin Lokasi dalam satu tahun}}$	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada persoalan bangunan yang perlu ganti rugi



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		76	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	$\frac{\text{Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	100%	Dinas PUPR	Yang berwarna merah yang dilaksanakan tahun 2021



**INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	492 pengaduan yang ditangani	Sat Pol PP	Dari hasil operasi dan pengamanan sertapatroli
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.300 orang		Terdata dari Ketika melakukan Bimbingan Teknis Pembekalan dan Penyuluhan Anggota Satlinmas
		3	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	Jenisnya : 1. Papan pengumuman 2. Mobil pimpinan 3. Mobil operasional 4. Motor patwal		Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
		4	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakan		Terdata Ketika melakukan operasi Penegakan Perda dan Perkada, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta Operasi Penagakan Pergub dan Surat Edaran Gubernur terkait Covid 19
		5	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6 orang		Terdata ketika melakukan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Mega Mendung



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	2 SOP		Terdata Ketika melakukan pembahasan Bersama Pejabat dan Anggota Sat Pol PP



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Sosial Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Sosial

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sosial	1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	50 orang	UPT. Kesos Tuna Netra dan Karya Wanita	- Panti Pemerintah Provinsi Tuna Netra Hitbia Kupang 50 Penerima Manfaat (APBD). - Panti Pemerintah Pusat BRSPDS Rungu Wicara Efata Kupang 23 Penerima Manfaat (APBN). - 31 Panswasta 1.039 Penerima Manfat.
		2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	50 orang	Sda	Panti Pemerintah Provinsi Tuna Netra Hitbia Kupang 50 Penerima Manfaat (APBD).
		3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	10 unit	Sda	
		4	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	58 buah	Sda	- Tongkat OM 19 buah - Tongkat Tuna Netra 10 buah - Catur Tuna Netra 2 buah - Riglet 25 buah - Sentter 2 buah
		5	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 paket	Sda	
		6	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	1 orang	Sda	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		7	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	-	-	
		8	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 orang	Sda	Dokter
		9	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	22 paket	Sda	
		10	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1 paket	Sda	
		11	Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	1 orang	Sda	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	-	-	
		13	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	50 orang	Sda	
		14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	14 orang	Sda	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	8 orang	Sda	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		16	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	270 orang	UPT. Kesos Anak di Kupang	- 3 Panti Pemerintah Provinsi 270 Penerima Manfaat (APBD) : • Panti Riang Naibonat 90 Penerima Manfaat • Panti Ora Et Labora Waikabubak 90 Penerima Manfaat • Panti Taruna Harapan Lembata 90 Penerima Manfaat - 132 Panti swasta 1.583 Penerima Manfaat.
		17	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	270 orang	Sda	- Panti Riang Naibonat 90 Penerima Manfaat - Panti Ora Et Labora Waikabubak 90 Penerima Manfaat - Panti Taruna Harapan Lembata 90 Penerima Manfaat
		18	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	14 unit	Sda	- Panti Taruna Harapan Lembata 9 unit - Panti Ora Et Labora Waikabubak 2 unit - Panti Riang Naibonat 3 unit
		19	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	128 unit	Sda	128 unit = Stok alat bantu di dinas
		20	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	1 paket	Sda	- Panti Riang Naibonat 90 Penerima Manfaat - Panti Ora Et Labora Waikabubak 90 Penerima Manfaat - Panti Taruna Harapan Lembata 90 Penerima



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Manfaat
		21	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	3 orang	Sda	- Panti Taruna Harapan Lembata 1 orang - Panti Ora Et Labora Waikabubak 2 orang - Panti Riang Naibonat 3 orang
		22	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	26 buah	Sda	- Alat Tensi digital 3 buah - Termometer digital 3 buah - Timbangan 3 buah - Alat ukur tinggi badan 3 buah - Statescop 3 buah - Alat autocek 3 in 1 = 1 buah - Bengkok 4 buah - Pnsset 3 set = 6 buah
		23	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	3 orang	Sda	- Panti Taruna Harapan Lembata 1 orang Dokter - Panti Ora Et Labora Waikabubak 1 orang Dokter - Panti Riang Naibonat 1 orang Dokter
		24	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	1 orang	Sda	Panti Riang Naibonat
		25	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	7 paket	Sda	- Pembinaan rohani - Keterampilan mengelas besi - Pertukangan kayu - Menjahit - Pertanian - Peternakan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							- Kerajinan tangan
		26	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2 paket	Sda	- Pembinaan rohani - Olah raga
		27	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	-	-	
		28	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	270 orang	Sda	- Panti Riang Naibonat 90 Penerima Manfaat - Panti Ora Et Labora Waikabubak 90 Penerima Manfaat - Panti Taruna Harapan Lembata 90 Penerima Manfaat
		29	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	60 orang	Sda	- Panti Riang Naibonat 20 Penerima Manfaat - Panti Ora Et Labora Waikabubak 27 Penerima Manfaat - Panti Taruna Harapan Lembata 13 Penerima Manfaat
		30	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	60 orang	Sda	- Panti Riang Naibonat 20 Penerima Manfaat - Panti Ora Et Labora Waikabubak 27 Penerima Manfaat - Panti Taruna Harapan Lembata 13 Penerima Manfaat



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		31	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	119 orang	UPT. Kesos Lanjut Usia di Kupang	- 2 Panti Pemerintah Provinsi 119 Penerima Manfaat (APBD) : • Panti Budi Agung Kupang 65 Penerima Manfaat. • Panti Paduwau Maumere 54 Penerima Manfaat. - 35 Panti swasta 3.417 Penerima Manfaat.
		32	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	119 orang	Sda	
		33	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	19 unit	Sda	- Panti Budi Agung Kupang 11 wisma - Panti Paduwau Maumere 8 wisma
		34	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	128 unit	Sda	128 unit = Stok alat bantu di dinas
		35	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 paket	Sda	
		36	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	3 orang	Sda	- Panti Budi Agung Kupang = 2 orang - Panti Paduwau Maumere = 1 orang
		37	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	3 paket	Sda	- Pembinaan Rohani - Konseling - Terapi
		38	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	2 orang	Sda	Budi Agung = 1 orang Paduwau Maumere = 1 orang



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		39	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	4 orang	Sda	- Panti Budi Agung Kupang = 3 orang - Panti Paduwau Maumere = 1 orang
		40	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1 paket	Sda	Olah raga
		41	Jumlah lanjut usia terlanter yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Jumlah lanjut usia terlanter yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	12 orang	Sda	Budi Agung = 5 orang Paduwau Maumere = 7 orang
		42	Jumlah lanjut usia terlanter di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	Jumlah lanjut usia terlanter di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	28 orang	Sda	Budi Agung = 12 orang Paduwau Maumere = 16 orang
		43	Jumlah lanjut usia terlanter di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah lanjut usia terlanter di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	34 orang	Sda	Budi Agung = 18 orang Paduwau Maumere = 16 orang
		44	Jumlah lanjut usia terlanter di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah lanjut usia terlanter di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	19 orang	Sda	Budi Agung = 9 orang Paduwau Maumere = 10 orang
		45	Jumlah lanjut usia terlanter yang mendapatkan layanan pemulasaran	Jumlah lanjut usia terlanter yang mendapatkan layanan pemulasaran	19 orang	Sda	Budi Agung = 9 orang Paduwau Maumere = 10 orang
		46	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	-		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		47	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	-		
		48	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	-		
		49	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	-		
		50	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	-		
		51	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	-		
		52	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	-		
		53	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	-		
		54	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	-		
		55	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-		
		56	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	-		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		57	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	-		
		58	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	-		
		59	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	-		
		60	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	-		
		61	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	429 orang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bencana Alam = 372 Bencana Sosial = 57
		62	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	57 orang	Sda	Bencana Sosial = 57
		63	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	4 Lokasi	Sda	- Kampung Amanuban (Oebufu) - Gereja Karmel - Gereja St. Simon Petrus - Gereja Ebenheser
		64	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	8 orang	Sda	Kampung Amanuban (Oebufu) - Ibu hamil 5 orang - Lansia 3 orang
		65	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	482 orang	Sda	- Kampung Amanuban (Oebufu) 110 orang - Gereja St. Simon Petrus 372 orang



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		66	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	843 orang	Sda	-Tagana Provinsi 119 orang - Tagana Kabupaten/Kota 724 orang



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
 NAMA SKPD : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 2. Tenaga Kerja
 3. Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koperasi	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	$22 \times 100\%$ $1.442 = 1,52 \%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$	$22 \times 100\%$ $22 = 100 \%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$29 \times 100\%$ $4.282 = 0,67\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$	$317 \times 100\%$ $4.282 = 7,40 \%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{450}{4.282} \times 100\% = 10,50\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{270}{2.492.946} \times 100\% = 0,01\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{30}{4.282} \times 100\% = 0,70\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		8	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{542}{4.282} \times 100\% = 12,60\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		9	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{1}{4.282} \times 100\% = 0,07\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		10	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{0}{4.282} \times 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Adanya refocusing anggaran
		11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{600}{4.282} \times 100\% = 14,01\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	$\frac{1}{4.282} \times 100\% = 0,02\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		13	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	$\frac{180}{447} \times 100\% = 40,27\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		14	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam Sistem Data Online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	$\frac{580}{14.192} \times 100\% = 4,087\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		15	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang bermitra}}{\text{Jumlah Usaha Kecil yang ada}} \times 100\%$	$\frac{12}{14.192} \times 100\% = 0,085\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		16	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	$\frac{580}{13.612} \times 100\% = 4,26\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		17	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	$\frac{46}{14.146} \times 100\% = 0,325\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		18	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	$\frac{300}{14.192} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Tenaga Kerja				= 2,113%		
		19	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	$\frac{426}{14.192} \times 100\% = 3,003\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Adanya recofusing anggaran
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100 Kemudian nilai 100 dikurangi dengan hasil perhitungan selisih masing-masing indikator Kemudian hasil perhitungan di atas dijumlahkan dan dibagi 6	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Adanya recofusing anggaran
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK yang dilaporkan Kabupaten/Kota pada satu Provinsi	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tidak ada anggaran untuk pengambilan data di Kab/Kota
		4	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK Perusahaan	22	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		5	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNi/okupasi	$\frac{\text{Jumlah Penerapan Program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n}}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		6	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah instruktur keseluruhan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		7	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur keseluruhan pada tahun n}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{13}{400} \times 100\%$ = 3,25%	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		8	Persentase penganggur yang dilatih	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah penganggur pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{1.190}{110.000} \times 100\%$ = 1,08%	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		9	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{156}{1.590} \times 100\%$ = 9,68%	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		10	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}}{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{1.099}{1.590} \times 100\%$ = 69,11%	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		11	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{12}{69} \times 100\%$ = 17,39 %	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		12	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\Sigma \text{CPMI dilatih}}{\Sigma \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tidak ada perekrutan dan penempatan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		13	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tidak ada pelatihan untuk calon pekerja migran
		14	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$	$0 \times 100\%$ $0 = 0\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tidak dianggarkan Tahun 2021
		15	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan di provinsi pada tahun } n} \times 100\%$	$21 \times 100\%$ $21 = 100\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		16	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$	$30 \times 100\%$ $6.428 = 0,47\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		17	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh}} \times 100\%$	$45 \times 100\%$ $113 = 39,82\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		18	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	Jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan sesuai yang tercantum dalam formulir pendaftaran PKB di satu Provinsi pada tahun n.	2.262	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		19	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		20	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$	$\frac{492}{6.428} \times 100\% = 8,32\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		21	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah membentuk LKS Bipartit}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$	$\frac{12}{6.428} \times 100\% = 0,19\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100\%$	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tidak ada laporan pengaduan dari perusahaan ke Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		23	Jumlah mogok kerja	Jumlah mogok kerja yang diberitahukan di dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tidak ada laporan pengaduan dari perusahaan ke Dinas Koeprasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		24	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan (lock out) yang diberitahukan di dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tidak ada laporan pengaduan dari perusahaan ke Dinas Koeprasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		25	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tidak ada laporan pengaduan dari perusahaan ke Dinas Koeprasi, Tenaga Kerja



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan Transmigrasi
		26	Jumlah perselisihan hak	Jumlah perselisihan hak yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tidak ada laporan pengaduan dari perusahaan ke Dinas Koeprasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		27	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Jumlah perselisihan antar SP/SB yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	0	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tidak ada perselisihan SP/SB
		28	Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK yang dicatatkan pada dinas ketenagakerjaan pada tahun n.	58 kasus	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		29	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK karena adanya perselisihan PHK (per sektor) pada tahun n.	114 (92 laki-laki dan 22 perempuan)	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		30	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	Jumlah perselisihan yang diselesaikan secara perundingn bipartit melalui fasilitasi Dinas pada tahun n.	53 kasus	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		31	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada/tidak	Ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	4 lembaga
		32	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	UMP yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang – Undangan.	Rp.1.975.000,-	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		33	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$	$\frac{53}{58} \times 100\% = 91,38\%$	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		34	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	-	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Provinsi tidak mengeluarkan rekomendasi



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		35	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	-		Karena Angkatan kerja lokal tidak ada di NTT
		36	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	984	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		37	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	7.597	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		38	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	6.771	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		39	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	6	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		40	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	1	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Booklet halaman 24
		41	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	9	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Booklet halaman 24
		42	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK)	1.215	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		43	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	$\frac{\Sigma \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\Sigma \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tahun 2021 tidak ada



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		44	Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	$\frac{\Sigma \text{ijin yang diterbitkan}}{\Sigma \text{pengajuan ijin kantor cabang}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$ = 0%	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Tahun 2021 tidak ada
		45	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	$\frac{\Sigma \text{pos pelayanan yang terbentuk}}{\Sigma \text{debarkasi/embarkasi}} \times 100\%$	$\frac{1}{14} \times 100\%$ = 7,14 %	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Pos Bandara El Tari Kupang
		46	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	512	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		47	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	619	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		48	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	529	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		49	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	488	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		50	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	345	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Karena selama ini tidak ada perusahaan yang khusus mempekerjakan tenaga perempuan
		51	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	116	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		52	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	2	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		53	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	380	Dinas Koperasi, Nakertrans	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Provinsi NTT	
3.	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Data perencanaan tahun 2020 direcofusing
		2	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Permukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	2 UPT/ 43 unit	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	16 unit	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	
		4	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	Tidak ada	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Dana perencanaan tahun 2020 direcofusing
		5	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Permukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	3 UPT/ 8 unit	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Sama dengan nomor 2
		6	Jumlah satuan permukiman yang dibina	Jumlah satuan permukiman yang dibina	10 unit	Dinas Koperasi, Nakertrans Provinsi NTT	Sama dengan nomor 3



**INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021**

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	39 OPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	13 program dan 13 kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	
		3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Tidak ada		
		5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi}} \times 100\%$	$\frac{356}{356} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	
		6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1. TPA (Taman Penitipan Anak) HI Setda Provinsi NTT	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas Pola Asuh (Parenting Skill) Bagi Pengasuh/Pendidik Tempat Penitipan Anak (TPA) HI Setda



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Provinsi NTT
		7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1. TPA (Taman Penitipan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Laporan Kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas Pola Asuh (Parenting Skill) Bagi Pengasuh/Pendidik Tempat Penitipan Anak (TPA) HI Setda Provinsi NTT
		8	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	
		9	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	DAFTAR P2TP2A
		10	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	$\frac{376}{376} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Data SIMFONI PPA
		11	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	
		12	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Sarana :631 unit Prasarana : 21 unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Data terlampir
		2	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	69 sertifikat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	26 sertifikat (produsen) 43 sertifikat (pengedar)
		3	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar	1 dokumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	
		4	Prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	$\frac{21}{21} \times 100\%$ $= 100 \%$	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	
		5	Pengendalian pengangguhan serangan organisme pengganggu pertanian	Jumlah luas pengendalian OPT dalam Provinsi	Padi : 381 Ha Jagung : 619 Ha Kacang Hijau : 50 Ha Cabai : 30 Ha Bawang merah : 20 Ha Kelapa : 10 Ha Kopi : 100 Ha Total : 1.210 Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pangan	6	Luas areal pengendalian dan penganggulangan bencana	Jumlah areal yang dikendalikan	2.129 Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Luas Areal yang terkena bencana banjir: Padi: 10.922,4 Ha Jagung: 7.880,4 Ha Total: 18.802,8 Ha Yang dikendalikan: 2.129 Ha Melalui kegiatan optimalisasi lahan (pembangunan infrastruktur (irigasi dan dalam parit)
		7	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian	Tanaman Pangan : 201 rekomendasi Hortikultura : 69 Sertifikat Kompetensi Total : 270 dokumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Dinas pertanian dan Ketahanan pangan Prov. NTT hanya mengeluarkan rekomendasi (tanaman pangan) dan sertifikat kompetensi (Hortikultura) sedangkan untuk perijinan merupakan wewenang dari Dinas Perijinan.
		8	Persentase sarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah sarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang dibangun}} \times 100\%$	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	
		9	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulagi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	$\frac{2.192}{7.880,4} \times 100\%$ = 11,32 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Bencana banjir
		10	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	$\frac{2}{2} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Usaha pertanian yang difasilitasi adalah Pengembangan Industry Pengolahan dan Pengolahan Kopi



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Terdapat 10 gudang cadangan pangan di 10 Kabupaten (Kab. Kupang, TTU, Sikka, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Timur, Flores Timur, Alor dan Sumba Barat Daya, dan Nagekeo)
		2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	
		3	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	Cara menghitung Cadangan Beras Pemerintah Provinsi $= 20\% \times \text{cadangan beras total provinsi}$ $= 20\% \times 326.191,16$ $= 65.238,23 \text{ ton}$ Cara menghitung Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) = $20\% \times \text{cadangan beras total Provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi} : 1000$ $= (0,5 \times 5.325.570 \times 122,5) : 1000$ $= 326.191,16 \text{ ton}$	668.384,86	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	
		4	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	
		5	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Frekuensi/jumlah promosi target konsumsi pangan	5 kali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Promosi yang dilakukan berupa Talk Show, gathering UMKM, Banner, baliho dan bahan kemasan
		6	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Tersedia peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) tingkat Provinsi NTT
		7	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Ada/tidak sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Informasi situasi kerentanan pangan Provinsi melalui Peta FSVA



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada/tidak intervensi pada kejadian kerawanan pangan	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	
		9	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Cadangan pangan pemerintah yang telah tersalurkan sebanyak 1.352.568,20 kg di 16 Kabupaten/Kota. Total CPP yang ada sebanyak 2.400.000 kg.
		10	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada/tidak dokumen registrasi dan sertifikat pangan segar	Ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lingkungan Hidup	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) $\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$ Rumus Metode IP : $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ IKU = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	A. IKA: 59,78 B. IKU: 89.90 C. IKTL: 58.47	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT.	
		2	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi _____ x 100% Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi	15 _____ x 100 % 15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					= 100 %	DPMPPTSP Provinsi NTT	
		3	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{1}{15} \times 100\%$ = 6,67 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan DPMPPTSP Provinsi NTT	
		4	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui dengan Perda}}{\text{Jumlah Usulan MHA}} \times 100\%$ Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	$\frac{2}{0} \times 100\%$ = 0 %	Data MHA Balai JBNT	
		5	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	$\frac{0}{2} \times 100\%$ = 0 %	Data MHA Balai JBNT	Pelatihan tidak dilaksanakan
		6	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	$\frac{0}{2} \times 100\%$ = 0 %	Data MHA Balai JBNT	Pelatihan tidak dilaksanakan
		7	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	$\frac{6}{6} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan berdampak lintas kabupaten/kota				
2	Kehutanan	1	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	$\frac{\text{Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{0}{22} \times 100\% = 0\%$		Belum ada dokumen;
		2	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	$\frac{\text{Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disahkan}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{17}{22} \times 100\% = 77,27\%$ $\frac{0}{22} \times 100\% = 0\%$		Data pada UPT KPH Belum ada dokumen
		3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Jumlah luas lahan kritis yang direhabilitasi	1.236,41 Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	
		4	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	$\frac{\text{Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi}}{\text{Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi}} \times 100\%$	$\frac{1.456,44}{1.220.928} \times 100\% = 0,12\%$	UPT KPH	Luasan Sesuai data dari UPT KPH Wilayah Kabupaten TTU, Sumba Timur, Flores Timur dan Sikka
		5	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	$\frac{\text{Luas hutan yang terganggu}}{\text{Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi}} \times 100\%$	$\frac{157,60}{1.220.928} \times 100\% = 0,01\%$		Luas Hutan terganggu - Illegal logging - Perambahan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	$\frac{\text{Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang aktif}}{\text{Jumlah izin yang ada}} \times 100\%$	$\frac{13}{13} \times 100\% = 100\%$		
		7	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan (ada/tidak)	-		Pengelolaan Tahura merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota
		8	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	655	Dinas LHK Provinsi NTT	
		9	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	-		Pengelolaan Tahura merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota
		10	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	-		Pengelolaan Tahura merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota
		11	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	$\frac{\text{Jumlah penyuluh kehutanan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$	$\frac{91}{309} \times 100\% = 29,13\%$		Penyuluh Kehutanan saat ini hanya terdapat di 18 Kabupaten dari 22 Kab/Kota yang ada di NTT
		12	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	$\frac{\text{Jumlah sarpras yang ada}}{\text{Jumlah penyuluh}} \times 100\%$	$\frac{0}{91} \times 100\% = 0\%$	Dinas LHK Provinsi NTT	
		13	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah KTH yang diberikan diklat}}{\text{Rencana atau target KTH yang akan diberikan Diklat}} \times 100\%$	Tidak Ada		
		14	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	Jumlah kelompok yang terfasilitasi atau jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada	195 KTH	Dinas LHK Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		15	Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten Kota dan dalam Daerah Kabupaten Kota dalam 1 Daerah Provinsi _____ x 100% Jumlah Total Das dalam 1 Provinsi	0 _____ x 100% = 0 % 3.977		Tidak ada Rencana Pengelolaan DAS yang disusun tahun 2021
		16	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	Jumlah forum komunikasi DAS yang ditetapkan	Tidak ada		Tidak ada Forum Komunikasi DAS yang ditetapkan Tahun 2021



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	443 desa	IDM Kemendes PDT	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	106 desa (443-337 desa)	IDM Kemendes PDT	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	8.159 lembaga	IDM Kemendes PDT	Dari dana desa, APBD II dan APBD Provinsi
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	8.159 lembaga	IDM Kemendes PDT	Kegiatan Pemberdayaan pada Posyandu Aktif dan PKK Aktif
		5	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	443 desa	Konsultan pendamping Wilayah 5 (KPW5), IDM Kemendes PDT	Difasilitasi oleh Pendamping Desa (sama dengan nomor 1)



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	106 desa (443-337 desa)	Konsultan pendamping Wilayah 5 (KPW5), IDM Kemendes PDT	Sama dengan nomor 2
		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	8.159 lembaga	IDM Kemendes PDT	Sama dengan nomor 3
		8	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	8.159 lembaga	BPS Provinsi NTT, IDM Kemendes PDT	Kegiatan Pemberdayaan (sama dengan nomor 4)



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Perhubungan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perhubungan	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe B yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	Jumlah Terminal sebanyak 9 Buah a. Terminal Oebobo Fasilitas yang ada 1. Jalur Keberangkatan Kendaraan 2. Jalur kedatangan Kendaraan 3. Ruang tunggu penumpang 4. Tempat parkir 5. Ruang pembelian tiket 6. Fasilitas pengendapan kendaraan 7. Toilet b. Terminal Noelbaki 1. Jalur Keberangkatan Kendaraan 2. Jalur kedatangan Kendaraan 3. Ruang tunggu penumpang 4. Tempat parkir 5. Fasilitas pengendapan kendaraan 6. Toilet c. Terminal Lamawalang 1. Jalur Keberangkatan Kendaraan 2. Jalur kedatangan Kendaraan 3. Ruang tunggu penumpang 4. Tempat parkir 5. Fasilitas pengendapan kendaraan 6. Toilet d. Terminal Haumeni 1. Jalur Keberangkatan Kendaraan. 2. Jalur kedatangan Kendaraan 3. Ruang tunggu penumpang 4. Tempat parkir	BIDANG ANGKUTAN JALAN	- Fasilitas Yang ada/dimiliki tidak sesuai dengan Standar yang ada sesuai dengan permenhub Nomor PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan - Telah Diusulkan Tahun 2020 untuk pembangunan 7 Terminal, tapi karena keterbatasan Anggaran maka usulan tersebut tidak diakomodir.



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					5. Fasilitas pengendapan kendaraan 6. Toilet e. Terminal Kefamenanu 1. Jalur Keberangkatan Kendaraan 2. Jalur kedatangan Kendaraan 3. Ruang tunggu penumpang 4. Tempat parkir 5. Fasilitas pengendapan kendaraan 6. Toilet f. Terminal Lolowa 1. Jalur Keberangkatan Kendaraan 2. Jalur kedatangan Kendaraan 3. Ruang tunggu penumpang 4. Tempat parkir 5. Ruang pembelian tiket 6. Fasilitas pengendapan kendaraan 7. Toilet g. Terminal Watujaji 1. Jalur Keberangkatan Kendaraan 2. Jalur kedatangan Kendaraan 3. Ruang tunggu penumpang 4. Tempat parkir 5. Fasilitas pengendapan kendaraan 6. Toilet h. Terminal Nggorang 1. Jalur Keberangkatan Kendaraan 2. Jalur kedatangan Kendaraan 3. Ruang tunggu penumpang 4. Tempat parkir 5. Fasilitas pengendapan kendaraan 6. Toilet i. Terminal Mena 1. Jalur Keberangkatan Kendaraan 2. Jalur kedatangan Kendaraan 4. Ruang tunggu penumpang Tempat parkir		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					5. Fasilitas pengendapan kendaraan 6. Toilet Fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang yang sesuai standar pelayanan : 1. Fasilitas Utama A. Jalur Keberangkatan Kendaraan B. Jalur kedatangan Kendaraan C. Ruang tunggu penumpang D. Tempat parkir E. Fasilitas Pengelolaan Lingkungan Hidup F. Perlengkapan Jalan G. Fasilitas Teknologi H. Media informasi I. Penanganan pengemudi J. Pelayanan Pengguna terminal K. Fasilitas pengawasan keselamatan L. Jalur kedatangan penumpang M. Ruang tunggu keberangkatan N. Ruang pembelian tiket O. Ruang pembelian tiket untuk Bersama P. Outlet pembelian tiket secara online Q. Pusat informasi R. Papan perambuan dalam terminal S. Papan pengumuman T. Layani bagasi U. Ruang penitipan barang V. Tempat berkumpul darurat W. Jalur evakuasi bencana dalam	PERMENHUB NO.PM 132 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					terminal		
					2. Fasilitas Penunjang A. Fasilitas penyandang cacat B. Fasilitas keamanan C. Fasilitas pelayanan keamanan D. Fasilitas ramp check E. Fasilitas awak kendaraan F. Fasilitas pengendapan kendaraan G. Fasilitas bengkel H. Fasilitas Kesehatan I. Fasilitas peribadatan J. Tempat transit penumpang K. Alat pemadam kebakaran 3. Fasilitas Umum A. Toilet B. Fasilitas park and ride C. Tempat istirahat kendaraan D. Fasilitas pereduksi E. Fasilitas pemantau kualitas Udara F. Fasilitas kebersihan G. Fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum H. Fasilitas perdagangan, kantin I. Area merokok J. Fasilitas restoran K. Fasilitas ATM L. Troly M. Fasilitas area internet N. Fasilitas penginapan O. Fasilitas keamanan P. Media pengaduan layanan Q. Fasilitas umum lainnya		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jadi Standar Fasilitas Penyelenggaraan Terminal penumpang adalah sebanyak 51 buah Persentase dari setiap Fasilitas Terminal adalah sebagai berikut : 1. Terminal Oebobo Jumlah Fasilitas = 7 Sesuai standar = $51/7 \times 100 = 13,73\%$ 2. Terminal Noelbaki Jumlah Fasilitas = 6 Sesuai standar = $51/6 \times 100 = 11,76\%$ 3. Terminal Haumeni Jumlah Fasilitas = 6 Sesuai standar = $51/6 \times 100 = 11,76\%$ 4. Terminal Kefamenanu Jumlah Fasilitas = 6 Sesuai standar = $51/6 \times 100 = 11,76\%$ 5. Terminal Lolowa Jumlah Fasilitas = 7 Sesuai standar = $52/7 \times 100 = 13,73\%$ 6. Terminal Watujaji Jumlah Fasilitas = 6 Sesuai standar = $52/6 \times 100 = 11,76\%$ 7. Terminal Mena Jumlah Fasilitas = 6 Sesuai standar = $51/6 \times 100 = 11,76\%$ 8. Terminal Nggorang Jumlah Fasilitas = 6 Sesuai standar = $51/6 \times 100 = 11,76\%$ 9. Terminal Lamawalang Jumlah Fasilitas = 6 Sesuai standar = $51/6 \times 100 = 11,76\%$ perhitungannya adalah Jumlah terminal yang memiliki Terminal yang memiliki fasilitas sebanyak 6 buah adalah 7 terminal. $7 \times 11,76 = 82,32 / 7 = 11,76\%$ Terminal yang memiliki fasilitas sebanyak 7 buah adalah 2 terminal. $2 \times 13,73 = 27,46 / 2 = 13,73\%$		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentasenya adalah $11,76 + 13,73 = 25,49 / 2 = 12,74\%$		
		2	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Tarif}}{\text{Jumlah trayek AKDP, angkutan perkotaan dan perdesaan}} \times 100\%$	- Tarif yang ditetapkan sebanyak 2 yaitu angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek - Jumlah trayek AKDP = 60 trayek, jumlah trayek pedesaan = 0 trayek, jumlah trayek perkotaan = 0 trayek Perhitungannya sebagai berikut: $= 60/60 \times 100\%$ $= 100\%$	BIDANG ANGKUTAN JALAN	
		3	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Provinsi Target kebutuhan perlengkapan}}{\text{Jalan Provinsi}} \times 100\%$	Jumlah Perlengkapan Jalan 1. Rambu = 1030 Unit 2. Guardrail = 2.667 M 3. Marka Jalan = 12.260 M 4. RPPJ = 23 Unit 5. LPJU = 47 Unit Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan 1. Rambu = 20 Unit 2. Guardrail = 250 M 3. LPJU = 20 Unit a. Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan sebanyak tahun 2021 sebanyak 22 unit b. Perhitungannya $22/40 \times 100 = 55$		



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Komunikasi dan Informasi, Statistik & Persandian

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Komunikasi dan Informasi	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yg saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yg diamankan yg disediakan o/ Dinas Kominfo $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo/Bidang Infrastruktur	Ada 39 Perangkat Dearah yang terkoneksi di jaringan intra atau yang menggunakan akses internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nus tenggara Timur
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah OPD yg menggunakan akses internet yg berkualitas yg disediakan o/ Dinas Kominfo $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo/Bidang Infrastruktur	Ada 39 Perangkat Dearah yang terkoneksi di jaringan intra atau yang menggunakan akses internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa tenggara Timur
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sitem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah. (Tidak Ada)	Ada	Dinas Kominfo/Bidang Layanan E-Government	1. Dalam bentuk suara dan video yaitu : video conference (VICON) 2. Dalam bentuk Teks yaitu E-mail Sanapati



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event) OPD & pelayanan public pada Pemda yg diselenggarakan secara daring dgn memanfaatkan domain & sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dgn PM Kominfo No.5/2015 $\frac{\text{Jumlah Kegiatan (event) OPD \& pelayanan publik pada Pemda}}{\text{Jumlah Kegiatan (event) OPD \& pelayanan publik pada Pemda}} \times 100\%$	9 12 $\frac{9}{12} \times 100\% = 75\%$	Dinas Kominfo/Bidang Layanan E-Goverment	Jumlah website aktif
		5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah OPD yg memiliki portal & situs web yg sesuai standar $\frac{\text{Jumlah OPD yg memiliki portal \& situs web yg sesuai standar}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	31 39 $\frac{31}{39} \times 100\% = 79,48\%$	Dinas Kominfo/Bidang Layanan E-Goverment	Jumlah website aktif
		6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah OPD yg mengimplementasikan layanan aplikasi umum & aplikasi khusus yg ditetapkan sesuai dgn ketentuan perundang-undangan $\frac{\text{Jumlah OPD yg mengimplementasikan layanan aplikasi umum \& aplikasi khusus yg ditetapkan sesuai dgn ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	39 39 $\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo/Bidang Layanan E-Goverment	Ada 39 Perangkat Dearah yang memiliki Portal dan situs web yang sesuai standar pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur
		7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik & layanan administrasi pemerintahan) yg tercantum dlm dokumen proses bisnis yg telah diimplementasikan secara elektronik $\frac{\text{Jumlah Layanan SPBE (layanan publik \& layanan administrasi pemerintahan) yg tercantum dlm dokumen proses bisnis yg telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah Layanan SPBE (layanan publik \& layanan administrasi pemerintahan) yg tercantum dlm dokumen proses bisnis yg telah diimplementasikan secara elektronik}} \times 100\%$	6 8 $\frac{6}{8} \times 100\% = 75\%$	Dinas Kominfo/Bidang Layanan E-Goverment	-. Ada 8 Layanan SPBE yang telah mengimplementasikan secara elektronik yaitu : e-Absen, e-Nadi, PPID, Website PEMPROV, Tanda Tangan Elektronik, Buku Tamu Digital, Siep, Email Sanapati -. Dan 6 Layanan yang sudah di implementasikan yaitu : e-Absen, e-Nadi, PPID, Website PEMPROV, Tanda Tangan Elektronik, Buku Tamu Digital



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan public \& layanan administrasi pemerintahan) yg memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah Layanan}} \times 100\%$	40 $\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo/Bidang E-Government	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2020
		9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yg terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah system elektronik}} \times 100\%$	16 $\frac{16}{39} \times 100\% = 41,00\%$	Dinas Kominfo/Bidang E-Government	Ada 16 Sistem Elektronik yang terdaftar yaitu : 1. Dinas Pertanian Dan Kertahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=101, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=44 2. Biro Administrasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=31, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=43, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=46, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=37, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=96, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=46 3. Badan Pendapat dan Aset Daerah Provinsi NTT : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=93, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=94, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=95,



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							4. Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=70, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=92 5. Provinsi NTT : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=81, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=85 6. Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=84, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=80, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=76 7. Dinas Peternakan Provinsi NTT : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=81 https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=815 8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=79, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=83



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=75, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=78, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=82 10. INSPEKTORAT Daerah Provinsi NTT : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=74, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=77 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=72, 12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=71 13. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi NTT : https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=45, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=48,



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							/berita?id=68, https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=69 , https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=86 , https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=87 , https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=88 , https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=89 , https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=90 , https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=91 , https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=99 , https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=102 , https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=103 , https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=104 https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=105 16. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT https://nttprov.go.id/client/view/doc_anggaran Dan Jumlah yang seharusnya 39 Perangkat Daerah
		10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik & layanan administrasi yg terintegrasi dgn sistem penghubung layanan pemerintah _____ x 100% Jumlah Layanan public & layanan administrasi	$\frac{6}{9} \times 100\% = 66,66\%$	Dinas Kominfo/Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Ada 9 Layanan Publik dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yaitu : 1. Sistem Layanan Pendidikan 2. Sistem Informasi Kesehatan 3. Sistem Informasi Ekonomi



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pertanian 4. Sistem Informasi Publik 5. Sistem Informasi Tanam Pangan 6. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah 7. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 8. Aplikasi Perpustakaan 9. Aplikasi Pengadaan Ada 6 layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah yaitu : 1. Sistem Layanan Pendidikan 2. Sistem Informasi Kesehatan 3. Sistem Informasi Publik 4. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 5. Aplikasi Perpustakaan 6. Aplikasi Pengadaan
		11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah OPD yg menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo/Bidang Informasi Publik	Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah yaitu 39 perangkat daerah
		12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah OPD yg menyimpan data di pusat}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo/Bidang Informasi Publik	Semua Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintahan.
		13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah OPD yg memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{32}{39} \times 100\% = 82,05\%$	Dinas Kominfo/Bidang Informasi Publik	-(32) perangkat daerah yang memperbaharui datanya -(39) jumlah total OPD Tingkat Provinsi NTT



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yg dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yg dimiliki pemerintah daerah}} \times 100\%$	$\frac{32}{39} \times 100\% = 82,05\%$	Dinas Kominfo/Bidang Informasi Publik	(32) Perangkat Daerah yang membagi data pada website ppidutama.nttprov.go.id
		15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah OPD yg mengimplementasikan inovasi yg mendukung smart city}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{12}{39} \times 100\% = 30,00\%$	Dinas Kominfo/Bidang Layanan E-Government	12 Perangkat Daerah dan Layanan aplikasi yang mendukung Smart City : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov.NTT Layanan Aplikasinya : SIMFONI PPA. Yang mendukung Smart City 2. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov.NTT . Layanan Aplikasinya : SPESIAL Yang mendukung Smart City 3. Dinas Kesehatan Prov.NTT Layanan Aplikasinya : Aspak. Mendukung Smart City 4. RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Layanan Aplikasinya MEDISMAART. Yang Mendukung Smart City 5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.NTT dengan Layanan Aplikasi FSVA NTT. Yang Mendukung Smart City 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Pov.NTT dengan Layanan Aplikasi e-SIEP. Yang Mendukung Smart City 7. Dinas Pekerjaan Umum



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							dan Perumahan Rakyat Prov.NTT dengan Layanan Aplikasi e-Data Konstruksi. Yang Mendukung Smart City 8. Dinas Perhubungan Prov.NTT dengan layanan aplikasi PORTAL. Yang Mendukung Smart City 9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov.NTT dengan layanan aplikasi www.parakraf.nttprov.go.id. Yang Mendukung Smart City 10. Bappelitbangda Prov.NTT dengan Layanan Aplikasi S-DGS. Yang Mendukung Smart City 11. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov.NTT. dengan Layanan Aplikasi SIPKD. Yang Mendukung Smart City. 12. Biro Hukum dengan Layanan Aplikasi ILDIS. Yang Mendukung Smart City
		16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yg tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo _____ x 100% Jumlah ASN Pengelola TIK	3 _____ x 100% = 27,27% 11	Dinas Kominfo/Bidang Layanan E-Government	3 ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi yaitu : 1. Maria . Y.W. Tuda, ST., MT 2.Petrix Nomleni, S.Kom., MT 3.Marianus Sabu, A.Md 11 ASN Pengelola TIK yaitu : 1.Sri Christin Suryanti Lino, S.Kom 2.Yanni Isabella, S.Kom 3.Frans F. G. Bessie, ST, MM 4.I Made Artahana, ST



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							5.Martha Elisabeth Djira, ST 6.Yyun Sari Dima, S.Kom 7.Fian Manafe, S.Kom 8.Helmy. R. Naffie. S.Kom
		17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada)	Ada 100 %	Dinas Koinfo/Bidang Layanan E-Government	Ada 4 Peraturan : 1. Peraturan Gubernur NTT Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 115 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Gubernur NTT Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Portal Website Pemerintah Provinsi NTT 3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Sentra Informasi Ekonomi Pertanian Terpadu Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 4. Instruksi Gubernur NTT Nomor Bu.049/18/KOMINFO/2021 Tentang Implementasi Aplikasi e-Nadi NTT Tanda Tangann Elektronik Gubernur NTT
		18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{\Sigma \text{ Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemda Provinsi yg telah menyebarkan informasi \& kebijakan Pemerintah}}{\Sigma \text{ Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemda Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{\Sigma 634.018}{5.325.556} \times 100\% = 11,90\%$	Dinas Koinfo/Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Perhitungan dilihat dari jumlah permohonan informasi, kunjungan website, kunjungan media sosial pada Dinas Koinfo Provinsi NTT



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program & kebijakan pemerintah & pemerintah Provinsi sesuai dgn strategi komunikasi (STRAKOM) $\frac{\Sigma \text{Konten informasi terkait program \& kebijakan Pemerintah \& Pemprov}}{\Sigma \text{Konten informasi terkait program \& kebijakan Pemerintah \& Pemprov}} \times 100\%$	$\Sigma 104$ $\frac{104}{104} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo/Bidang Informasi Publik	Total konten 104 yang terbagi dari : -83 konten program dan kegiatan -21 konten regulasi
		20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Σ Diseminasi & layanan informasi public yg dilaksanakan sesuai dg strategi komunikasi (STRAKOM) & SOP $\frac{\Sigma \text{Diseminasi \& layanan informasi publik}}{\Sigma \text{Diseminasi \& layanan informasi publik}} \times 100\%$	$\frac{89}{89} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo/Bidang Informasi Publik	-(38) Informasi yang dibagikan melalui Youtube Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.NTT -(30) Informasi yang dibagikan melalui Facebook Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur -(21) Informasi yang dibagikan melalui Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada 100%	Dinas Kominfo/Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya buku profil daerah
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	39 PD		Survey Statistik Sektoral yang dilakukan 39 Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	39 PD		Survey Statistik Sektoral yang dilakukan 39 Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	39 PD		Survey Statistik Sektoral yang dilakukan 39 Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Timur
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	39 PD		Survey Statistik Sektoral yang dilakukan 39 Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$		1. Metadata: Kompilasi Data 1 Kegiatan : Cetak Buku
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$		1 Metadata Indikator Statistik Kompilasi Data 1 : Indikator Statistic Sektoral
3	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yg ada}} \times 100\%$	$\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$		- Kegiatan Strategis teramankan yaitu Ruang Gubernur NTT - 4 Kegiatan Strategis yang ada yaitu : Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yg menerapkan SMKI \& diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yg ada}} \times 100\%$	$\frac{30}{49} \times 100\% = 61,22\%$	Dinas Kominfo/Bidang Persandian	
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yg telah diaudit dgn resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yg ada}} \times 100\%$	$\frac{25}{49} \times 100\% = 51,02\%$		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$	$\frac{43}{65} \times 100\% = 66,15\%$		Untuk 43 titik yang teramankan dan 65 jumlah titik keseluruhan PHKS



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penanaman Modal	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Pemberian Insentif berupa Pembebasan biaya penerbitan dokumen izin/penerbitan dokumen izin tanpa dipungut biaya	DPMPTSP Prov.NTT	Saat ini pada DPMPTSP Provinsi NTT sudah ada Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal (ada/tidak)	Tidak Ada	DPMPTSP Prov.NTT	Belum ada SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Tidak Ada	DPMPTSP Prov.NTT	Belum adanya evaluasi terhadap pemberian fasilitas/insentif penanaman modal berupa pembebasan biaya penerbitan dokumen izin, karena respon masyarakat terhadap kebijakan ini sangat baik dan cukup membantu bagi usaha kecil menengah.
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Tidak Ada	DPMPTSP Prov.NTT	Adanya rasionalisasi anggaran berkaitan dengan pandemic covid 19 sehingga kegiatan seminar bisnis, forum one on one meeting tidak terlaksana.
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Tidak Ada	DPMPTSP Prov.NTT	Adanya rasionalisasi anggaran berkaitan dengan pandemic covid 19 sehingga kegiatan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							pameran penanaman modal dipending pelaksanaannya.
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	6 Kerjasama	DPMPTSP Prov.NTT	Kerjasama Proses Penerbitan Dokumen Ijin antara DPMPTSP Provinsi NTT dan DPMPTSP Kabupaten. Hal ini membuat Masyarakat/Pelaku Usaha tidak harus datang ke DPMPTSP Provinsi NTT untuk mengurus ijin yang menjadi kewenangan Provinsi namun cukup mengurus ijinnya di Kabupaten yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama. Ada 5 Kabupaten yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama yaitu : Kabupaten Rote Ndao, Alor, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Timor Tengah Selatan. Kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama tentang Sinergitas dalam Pengamanan Penerimaan dan Implementasi Surat Keterangan Fiskal.
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	1.693	DPMPTSP Prov.NTT	Adanya konsultasi perizinan dan non perizinan yg dilakukan berkaitan dengan Rekomendasi Teknis.
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	5.667 Izin	DPMPTSP Prov.NTT	Izin yg diterbitkan : realisasi s/d bulan Desember tahun 2021 sebanyak 5.667 buah izin yg diterbitkan dari target 4.000 izin atau (141.68%)
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat provinsi	Rp. 4.721.208.516.807,00 (PMDN: Rp. 3.604.375.743.581,00 PMA	DPMPTSP Prov.NTT	Realisasi penanaman modal dalam tahun 2021 Rp. 4.721.208.516.807,89 atau



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					: Rp. 1.116.832.773.226,00)		mencapai 94,42% dari target RPJMD Rp. 5.000.000.000.000
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	69 orang	DPMPTSP Prov.NTT	Adanya pemahaman 69 ASN terhadap kegiatan penanaman modal dan PTSP
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	109 Perusahaan	DPMPTSP Prov.NTT	Adanya perusahaan yg diawasi dalam pelaksanaan penanaman modal sebanyak 109 perusahaan
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah.	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	5.667 izin	DPMPTSP Prov.NTT	Adanya data dan informasi perizinan yg terpenuhi sebanyak 5.667 izin



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kepemudaan & Olahraga Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kepemudaan & Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepemudaan & Olahraga	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Tidak ada	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Tidak ada bantuan bagi pemuda dalam mengikuti kegiatan kewirausahaan pada Tahun 2021 karena keterbatasan Anggaran.
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak Ada	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Tidak ada bantuan kewirausahaan bagi pemuda pada Tahun 2021 karena keterbatasan anggaran.
		3	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	42 Orang Paskibraka	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Untuk Kegiatan kesukarelaan dan Kepeloporan kepeloporan pemuda tidak dilaksanakan karena terbatasnya Anggaran, dan yang dilaksanakan hanya paskibraka tingkat provinsi tahun 2021.
		4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tidak Ada	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Kegiatan tidak dilaksanakan karena dalam kondisi pandemi covid 19, sehingga kegiatan di <i>refocusing</i> .
		5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	37 Pelatih	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	1. PPLD = 9 orang 2. PPLMD = 5 orang 3. PPLP= 6 orang 4. SKO = 17 orang Jumlah = 37 orang
		6	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	279 Atlet 1. PPLP = 36 atlet 2. PPLD = 31 atlet 3. PPLMD = 10 atlet 4. SKO = 202 atlet	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Total Jumlah atlet yang dibina pada SKO,PPLP dan PPLM/PPLMD berjumlah 279 Atlet



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		7	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Tidak ada	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Tidak dilaksanakan kegiatan karena adanya pandemi covid 19, maka anggarannya di refocusing
		8	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Tidak ada	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Terbatasnya anggaran sehingga kegiatan kepramukaan tidak bisa dilaksanakan
		9	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Tidak ada	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Terbatasnya anggaran sehingga kegiatan kepramukaan tidak bias dilaksanakan



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kearsipan & Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100\%$	$\frac{15.706}{15.706} \times 100\% = 100\%$	Hasil Olahan Data Yg Dihimpun Dari OPD Lingkup Pemprov NTT	Terjadi refocusing anggaran 2021 untuk penanggulangan covid-19
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100\%$	$\frac{14.362}{14.362} \times 100\% = 100\%$	Hasil Olahan Data Yg Dihimpun Dari OPD Lingkup Pemprov NTT	Terjadi refocusing anggaran 2021 untuk penanggulangan covid-19
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100\%$	$\frac{936}{936} \times 100\% = 100\%$	Depo arsip Dinas Arpus Prov.NTT	Tidak dialokasikan dana
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yg telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip dinamis & statis Pemprov}} \times 100\%$	$\frac{555}{555} \times 100\% = 100\%$	Depo arsip Dinas Arpus Prov.NTT	Terjadi refocusing anggaran 2021 untuk penanggulangan covid-19
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	$\frac{1.382}{970} \times 100\% = 142,47\%$	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov.NTT	Terjadi refocusing anggaran 2021 untuk penanggulangan covid-19
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	$\frac{2.305}{2.305} \times 100\% = 100\%$	Depo arsip Dinas Arpus Prov.NTT	Bencana Alam, Seroja yang terjadi di Kupang Provinsi NTT
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	$\frac{923}{923} \times 100\% = 100\%$	Hasil olahan data yg dihimpun dari 5 OPD Lingkup Pemprov.NTT	Tidak dialokasikan dana



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	$\frac{936}{555} \times 100\% = 168,65\%$	Depo arsip Dinas Arpus Prov.NTT	Terjadi refocusing anggaran 2021 untuk penanggulangan covid-19
		9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$	Hasil Olahan Data Yg Dihimpun Dari Kab.Belu, Flores Timur, Manggarai Barat, Sabu Raijua dan TTU.	Penambahan Khazanah arsip bernilai tinggi pasda Depo Arsip Provinsi NTT.
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	0%	-	Tidak dialokasikan Anggaran
2	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yg tersedia diberbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) $\frac{\text{Koleksi perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	$\frac{244.499}{442.758} \times 100\% = 55,22\%$	Seksi Layanan	Perhitungan jumlah koleksi Dinas Arpus Prov.NTT tahun 2021
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yg memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite $\frac{\text{Jumlah kunjungan}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$	$\frac{78.622}{442.758} \times 100\% = 17,76\%$	Seksi Layanan	Perhitungan jumlah koleksi Dinas Arpus Prov.NTT tahun 2021
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan diberbagai perpustakaan di wilayahnya $\frac{\text{Tenaga perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	$\frac{289}{5.326.000} \times 100\% = 0,0054\%$	Seksi pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca	Perhitungan jumlah koleksi Dinas Arpus Prov.NTT tahun 2020
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan $\frac{\text{Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar Nasional}}{\text{Jumlah Perpustakaan Dari Berbagai Jenis Yg Terdapat di Wilayahnya}} \times 100\%$	Rata-rata jumlah perpustakaan sesuai standar perpustakaan nasional : $\frac{21+179+156+132+8+22+68+873+10+38}{10} \times 100\% = 150,70\%$	Seksi pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca	Perhitungan jumlah koleksi Dinas Arpus Prov.NTT tahun 2021



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				a. Perpustakaan umum Kab/Kota se-NTT yg sudah memenuhi standar : 21 $\frac{\quad}{22} \times 100\% = 95,45\%$			
				b. Perpustakaan SD Kabupaten/Kota se-NTT yg sudah memenuhi standar : 179 $\frac{\quad}{2.136} \times 100\% = 8,38\%$			
				c. Perpustakaan SLTP Kab/Kota se-NTT yg sudah memenuhi standar : 156 $\frac{\quad}{746} \times 100\% = 20,91\%$			
				d. Perpustakaan SLTA Kab/Kota se-NTT yg sudah memenuhi standar : 132 $\frac{\quad}{386} \times 100\% = 34,20\%$			
				e. Perpustakaan Perguruan Tinggi Kab/Kota se-NTT yg sudah memenuhi standar : 8 $\frac{\quad}{39} \times 100\% = 20,51\%$			
				f. Perpustakaan Khusus/Dinas Instansi Kab/Kota se-NTT yg sudah memenuhi standar : 22 $\frac{\quad}{233} \times 100\% = 9,44\%$			
				g. Perpustakaan Rumah Ibadah Kab/Kota se-NTT yg sudah memenuhi standar : 68 $\frac{\quad}{113} \times 100\% = 60,18\%$			



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				h. Perpustakaan Desa/Kelurahan Kab/Kota se-NTT yg sudah memenuhi standar : 873 _____ x 100% = 82,59% 1.057			
				i. Perpustakaan Puskesmas Kab/Kota se-NTT yg sudah memenuhi standar : 10 _____ x 100% = 22,22% 45			
				j. Perpustakaan TBM Kab/Kota se-NTT yg sudah memenuhi standar : 38 _____ x 100% = 16,96% 224			
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	63,00% (kategori sedang)	Perpustakaan Nasional RI Hasil Survey kegemaran Membaca di NTT Tahun 2020	
		6	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	98 judul / 131 eksemplar	Seksi Deposit	
		7	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	539 judul	Katalog Induk Daerah (KID) NTT Badan Perpustakaan Daerah Prov.NTT Tahun 2021	
		8	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	16 perpustakaan	Katalog Induk Daerah (KID) NTT Badan Perpustakaan Daerah Prov.NTT Tahun 2021	
		9	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	100 judul	Bibliografi NTT Badan Perpustakaan Daerah Prov.NTT Tahun 2021	
		10	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Seksi Preservasi & Alih Media Bahan Pustaka	Tidak tersediannya SDM di Bidang Alih Media.



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa	0	Seksi Preservasi & Alih Media Bahan Pustaka	Tidak tersedianya naskah kuno yang akan diahlimerdiakan.
		12	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Seksi Preservasi & Alih Media Bahan Pustaka	



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kelautan & Perikanan NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kelautan & Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelautan & Perikanan	1	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya pengelolaan di laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan	- WPP-NRI 573 = 22 Kabupaten/kota - WPP-NRI 713= 8 Kabupaten - WPP-NRI 714 = 3 Kabupaten	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Wilayah perairan laut provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yakni: WPP-NRI: 573, 713 dan 714 yang dapat dijelaskan dengan lokasi sebagai berikut: 1. WPP-NRI 573 (Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua dan Rote Ndao); 2. WPP-NRI 713 (Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat); 3. WPP-NRI 714 (Alor, Lembata dan Flores Timur) *PERMEN KP NO. 18 THN. 2014 (Data Terlampir)
		2	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan Provinsi per tahun	1.651 izin	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Izin usaha yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan di Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 370 Izin; - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 26 Izin; - Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) sebanyak 1.024 Izin; - SIPI ANDON (kapal dari luar daerah NTT yang datang mencari ikan di daerah NTT) sebanyak 201 Izin; - Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) ANDON sebanyak 8 Izin; - Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) sebanyak 10 Izin; - Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebanyak 12 Izin. (Data Terlampir)
		3	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	$\frac{\text{Jumlah pelabuhan perikanan yg memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional}}{\text{Jumlah seluruh pelabuhan perikanan}} \times 100\%$	$\frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\%$	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menginventarisir 23 (dua puluh tiga) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Nusa Tenggara Timur dengan rincian 3 (tiga) PPI telah diserahkan sedangkan 6 (enam) PPI belum diserahkan sedangkan 14 (empat belas) pelabuhan tidak dikategorikan sebagai PPI. 3 (tiga) PPI di NTT antara lain sebagai berikut: PPI Waingapu; PPI Oeba; PPP Tenau. Sedangkan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang Memenuhi Minimal 3 (tiga) Standar Operasional antara lain: a. PPP Tenau (Kota Kupang)



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							b. PPI Oeba (Kota Kupang) Sumber Data: Laporan Pelaksanaan Penyerahan P3D Urusan Kelautan dan Perikanan Sekda Tanggal 27 Desember 2021 (Data Terlampir)
		4	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30 GT dalam 1 tahun	Tidak ada	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2021 tidak ada kegiatan perizinan untuk pembangunan kapal berukuran 5-30 GT. Adapun permasalahannya antara lain adalah dalam hal dukungan petugas sumber daya manusia (SDM). Hal ini dikarenakan dibutuhkan jenis (frame) yang berbeda dari tiap kegiatan tersebut. Selain itu belum adanya pagu anggaran Penerbitan Izin Pembangunan kapal Penangkapan Ikan. Dokumen penunjang: a.UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020; b.Pasal 124 PP No 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan c.Permen KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. (Data Terlampir)
		5	Jumlah kapal yang terdaftar	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun	1.651 izin	Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Izin usaha yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan di Tahun 2021 antara lain sebagai berikut: -Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 370 Izin;



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							-Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 26 Izin; -Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) sebanyak 1.024 Izin; -SIPI ANDON (kapal dari luar daerah NTT yang datang mencari ikan di daerah NTT) sebanyak 201 Izin; -Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) ANDON sebanyak 8 Izin; -Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) sebanyak 10 Izin; -Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebanyak 12 Izin. (Data Terlampir)
		6	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang diterbitkan per tahun	2 (dua) Rekomendasi	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 mengeluarkan 2 (dua) rekomendasi untuk usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan. (Data Terlampir)
		7	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	$\frac{\text{Luas wilayah laut \& pesisir yg dikelola sesuai dgn peraturan perundangan yg berlaku}}{\text{Luas wilayah laut \& pesisir yg dimiliki}} \times 100\%$	$\frac{8.100.659 \text{ (ha)}}{20.000.000 \text{ (ha)}} \times 100$ = 40,50 %	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Luas Wilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan sebesar 200.000 km2 dikonversi dalam satuan hektar sebesar 20.000.000 ha seperti yang tertuang dalam Dokumen Naskah Akademik Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan luas wilayah perairan dalam wilayah pengelolaan Provinsi NTT sebesar 8.100.659 ha hampir 2 kali dari wilayah perairan daratannya sebagaimana tertuang dalam



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2037. (Data Terlampir)
		8	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir \& pulau-pulau kecil yg dikelola secara efektif}}{\text{Keseluruhan kawasan konservasi perairan yg dimiliki}} \times 100\%$	$\frac{276.693,38}{701.548,46} \times 100 = 39,44 \%$	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Setelah ditetapkan SAP Alor sebesar 276.693,38 ha oleh KKP-RI yang merupakan kewenangan Provinsi pada Tanggal 16 Juni 2015 - SAP Alor (Terlampir Kepmen Nomor 35/Kepmen-Kp/2015 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar Dan Laut Sekitarnya Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur) Proses panjang dalam upaya pelestarian sumber daya pesisir dan laut di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membuahkan hasil. Terbukti dengan ditetapkan 3 KKPD oleh KKP-RI pada Tanggal 21 Oktober 2021 yaitu: - KKPD Kabupaten Flores Timur (Terlampir Kepmen Nomor 94 Tahun 2021) sebesar 150.069,35 ha - KKPD Kabupaten Lembata (Terlampir Kepmen Nomor 95 Tahun 2021) sebesar 199.688,38 ha - KKPD Kabupaten Sikka



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							(Terlampir Kepmen Nomor 96 Tahun 2021) sebesar 75.097,68 ha Ada 4 (empat) misi pengelolaan KKPD Alor, yaitu: (1)Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan; (2)Mewujudkan peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia melalui transformasi pendidikan formal dan non formal yang didukung dengan peningkatan sarana prasarana yang memadai; (3)Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui optimalisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan; (4)Mewujudkan peningkatan kemandirian pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Implementasi keempat misi ini diarahkan untuk menjadi penggerak utama pembangunan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk ketahanan pangan, pengembangan pariwisata dan sektor industri kecil dan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							menengah. Dengan demikian, pengelolaan KKPD Alor yang efektif akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan baik di tingkat Pemerintah Provinsi NTT maupun Kabupaten Alor. Kontribusi SAP Alor terhadap pengelolaan kawasan konservasi yang efektif salah satunya dapat dibuktikan dalam dokumen dibawah ini: - Peta Proses Bisnis SAP Alor; - Kajian Model Lembaga Kolaborasi Alor Dengan Kelembagaan KKPD Alor. (Data Terlampir)
		9	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	32 Unit	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pada Tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan 2 (dua) kali Gelar Operasi Pengawasan dengan total jumlah kapal yang telah diperiksa adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) Kapal. Dari 32 (tiga puluh dua) kapal tersebut didapatkan 3 (tiga) unit kapal yang melakukan pelanggaran administrasi yaitu tanpa kelengkapan dokumen dan sudah habis masa berlaku ijinnya (Terlampir Pelaksanaan Operasi Kepatuhan yang telah dilakukan oleh Bidang Teknis)
		10	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya	2 Rekomendasi	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 mengeluarkan 2 (dua) rekomendasi untuk usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan. (Data Terlampir)



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	106 Unit Usaha Perikanan	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2021 adalah 43 (empat puluh tiga) UPI dan UKM sebanyak 63 (enam puluh tiga) sehingga total unit usaha dan pengolahan hasil perikanan sebanyak 106 (seratus enam) Unit Usaha Perikanan. (Data Terlampir)
		12	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	1 Rekomendasi dan 7 Keterangan Pemanfaatan Ruang Laut	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya	Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021) pada Tanggal Bulan Februari 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sehingga Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha di Perairan Pesisir, dapat didelegasikan kewenangannya kepada gubernur, dan dalam pelaksanaannya akan ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu Dinas Kelautan dan Perikanan hanya mendapatkan 1 rekomendasi dan 7 (tujuh) keterangan pemanfaatan Ruang Laut (3 Rekomendasi Izin Keluar Dari Pusat Dikarenakan Sudah Bukan Kewenangan Kita Di



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Provinsi Sejak Bulan Februari 2021). (Data Terlampir surat terkait Peraturan tersebut dan rekomendasi diatas)
		13	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	74 POKMASWAS	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	POKMASWAS merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam upaya penyadaran hukum melalui sosialisasi dan pelaksanaan prinsip 3 M (Melihat/Mendengar, Mencatat, dan Melaporkan). Peran POKMASWAS Sebagai pelaksana di tingkat lapangan memiliki peran sebagai berikut: 1. Membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan; 2. Melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; 3. Membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; 4. Melaporkan tindakan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir; 5. Mengisi logbook atau buku harian POKMASWAS yang berisi informasi mengenai kegiatan monitoring atau pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pokmaswas. Selama Tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							mengkukuhkan 74 (tujuh puluh empat) POKMASWAS. (Terlampir data POKMASWAS yang telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dis.PK188.48/SD1.38/IX/2021 Tanggal : 11 Oktober 2021)
		14	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	11 Rekomendasi	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan cara pengolahan Ikan yang baik (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (Standard Sanitation Operating Procedure) sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 72/Permen-KP/2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Selama Tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan 11 (sebelas) Sertifikat Kelayakan Pengolahan atau disingkat SKP. (Data Terlampir)



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pariwisata	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	9 Kawasan : - PE Liman, Kab Kupang - PE Mulut Seribu, Kab Rote Ndao - PE Praimadita, Kab Sumba Timur - PE Koanara, Kab Ende - PE Lamalera, Kab Lembata - PE Wolwal, Kab Alor - PE Fatumnasi, Kab TTS - Pantai Lasiana - Kampung Seni Flobamorata	Data Olahan Disparekraf	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	- Kawasan Pantai Liman : terdapat 4 unit cottage dengan 8 kamar dilengkapi dengan 6 lopo dan 1 restoran yang dilengkapi pedestrian. Terdapat 5 unit homestay milik warga setempat. Gereja, Pustu, Sekolah Dasar, PAUD berada di pusat desa dalam radius 2-3 KM. Listrik dan air sudah ada, namun perlu pengembangan. Jaringan telekomunikasi sudah ada perlu penambahan kekuatan sinyal. Terdapat sentra kuliner berupa warung sederhana di wilayah Bukit Liman. - Kawasan Pariwisata Estate Lamalera : 21 homestay , 1 gasebo dan 3 toilet. Dukungan peralatan untuk homestay yang	Data Olahan Disparekraf	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					dibangun seperti sprej dan selimut. Tahun 2020 telah dibangun rumah pos pantau dan fasilitas untuk foto both, gazebo kecil. Jaringan telkomsel ada tapi sinyal sulit, Sarana air bersih dan sanitasi masih minim. Listrik sudah ada walaupun hanya menyala pada malam hari. Tempat ibadah (kapela) yang ada telah dibantu dengan peralatan dan altar tahun 2020. Dari lewoleba menuju desa Lamalera A dan Lamalera B dapat ditempuh kurang lebih 4 Jam perjalanan menggunakan Mobil atau Motor. Akses jalan sebagian kecil baik namun sekitar 50 Km masih rusak berat. - Kawasan Pariwisata Estate Koanara : Akses jalan Negara (Trans Flores) dari Ende sangat baik, Transort Bis , Rental dan Ojek. Terdapat 25 unit cottage dan 8 unit resto yang dikelola masyarakat. 4 unit cottage (8 kamar) yang sudah dilengkapi dengan air dan listrik. Tahun 2020 dilengkapi dengan perlengkapan seperti tempat tidur, bantal, sprej., water heater. Juga terdapat 25 unit penginapan milik masyarakat setempat di sekitar lokasi. 1 unit restoran dan 2 lopo dibangun Pemprov NTT. Tahun 2020 dilakukan perbaikan resto		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan pembangunan instalasi air bersih. Puskesmas, sarana ibadah dan toko/pasar, jaringan listrik dan internet Kekurangan : Jalan masuk ke lokasi cottage, parkir, toilet umum, pintu gerbang (gapura), penambahan kekuatan jaringan internet. - Pariwisata Estate Fatumnasi : Jalan Kabupaten rusak berat dan ringan (18 km) dari soe menuju kapan. Jalan dari Kapan menuju fatumnasi kondisi baik 10 km dan kondisi rusak 5 km. Fasilitas transportasi rental mobil dan ojek. Jaringan listrik dan internet ada, pusat informasi pariwisata di Lopo Mutis, fasilitas kesehatan ada, pasar ada, BUMDEs. Sarana air bersih tersedia. Ada gereja. Tahun 2020 dilakukan pembangunan pagar pengaman, penataan pedestrian dan penataan tapak di lokasi Cottage. Cottage: - 4 unit (8 kamar dan 4 toilet dalam) dan 4 buah lopo, 2 toilet umum dan 1 restoran(milik Pemprov NTT). Tahun 2020 dilakukan penambahan meja dan kursi dan perlengkapan resto lainnya. - 2 unit (2 kamar dan 2 toilet dalam), 1 toilet umum, dan 3 Lopo (milik Pemda TTS) Home stay milik warga lokal 15 unit dan 3		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kamar mandi luar. - Pariwisata Estate Praimadita : Akses jalan menuju destinasi dari Waingapu (Terdapat Ruas jalan negara sepanjang 6 Km; Ruas jalan kabupaten sepanjang 63 KM; Ruas jalan provinsi sepanjang 28 KM; Ruas jalan non status sepanjang 2 KM) Transport ke lokasi pakai bis truk, rental, ojek. Akomodasi : 3 cottage (6 kamar) . Tahun 2020 dilengkapi dengan genset, mesin cuci, perlengkapan resto seperti kulkas. 2 unit home stay milik warga setempat. Amenitas : 1 unit resto dan 3 lopo 1 unit laundry, jalan setapak 60 meter, Tahun 2020 dilengkapi dengan pos jaga, toilet resto, pagar pengaman, rumah cinderamata. Sumber mata air ada, jaringan perpipaan 2 km dengan bak penampung yang masih dalam keadaan rusak. 5 kios, listrik PLTS 53 KK, menara telkomsel, BUMDes, Puskesmas Kekurangan: Penambahan kuat jaringan internet, gerbang kawasan, toilet umum, penataan parkir, lapak kuliner. - Pariwisata Estate Mulut Seribu : Jarak dari Kota Ba'a ke lokasi sekitar 46 km yang ditempuh selama 1 jam perjalanan. Kondisi jalan aspal dan ada		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					bagian yang masih rusak (simpang desa ke Oen sepanjang ± 8 km dan simpang Serubeda sepanjang ± 15 km). Akomodasi : 4 unit cottage (10 kamar). Dilengkapi 1 restoran dengan 2 toilet. Amenitas : 2 unit toilet, 10 bak sampah, parkir. Tahun 2020 dibangun pos jaga, menara air, penambahan peralatan resto dan pemasangan lampu penerangan tambahan. 1 unit warung milik warga, 2 unit lopo dan 1 foto corner. Puskemas Sotimori yangg terdekat. Jaringan internet Kekurangan: Pusat cinderamata, pagar pengaman, pelataran, gerbang kawasan, lapak untuk kiliner, kios cinderamata. - Pariwisata Estate Wolwal : Akses jalan dari Kalabahi ke lokasi sejauh 23 km, dengan kondisi jalan baik namun khusus jalan masuk ke lokasi masih merupakan jalan tanah. Akomodasi : 3 unit yang sudah dibangun dibangun oleh Pemerintah Provinsi , 9 kamar tidur luas kamar 5x4 meter dengan teras kamar mandi dalam pakai shower + closed flush 1 unit cottage milik WNA yaitu cottage wisata alam Alor dengan tarif Rp. 3.000.000 per malam dan sudah beroperasi selama 3 tahun. Amenitas : 1		



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					unit resto, 2 lopo, toilet umum, parkir. Tahun 2020 dibangun kolam renang, rumah pompa, gapura, bak penampung air, pos jaga dan pagar. Sarana air bersih sudah dibangun 1 sumur bor, jaringan listrik dan sumur bor, puskesmas di Moru, ada pasar. Sudah ada Bumdes Harapan Baru dengan Nomor Akta Pendiriannya : Perdes No. 05 Tahun 2016. Fasilitas yang masih kurang: parkir, gerbang kawasan.		
		3	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	DAK FISIK : Rp. 1.627.512.080 Data Olahan Disparekra	DAK FISIK : Rp. 1.627.512.080 Data Olahan Disparekratif	
		4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Tidak Ada		Data investasi ada di Badan Penanaman Modal Daerah
		5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	Hotel terdaftar berjumlah 612 hotel	Data Olahan Disparekraf	
		6	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1,83 hari BPS NT	1,83 hari BPS NT	
		7	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	1,52 hari BPS NTT	1,52 hari BPS NTT	
		8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1. Timor Leste : 53,36 % 2. Malaysia : 26,34 % 3. Tiongkok : 3,22 % 4. Papua Nugini : 2,20 % 5. USA : 1.53 %	Kemeparekraf (Data Nasional)	Data kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTT tidak dihitung berdasarkan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							daerah asal, data yang digunakan adalah jumlah kunjungan per kebangsaan secara nasional.
		9	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	647.880 orang	Data Olahan Disparekraf	
		10	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Dukungan Festival Seni Budaya di Kab.Malaka	Data Olahan Disparekraf	
		11	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Pada Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Ekoomi Kraetif Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengikuti event-event ataupun festival yang diadakan di luar negeri.	Data Olahan Disparekraf	
		12	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	1. Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies, NTT (ASITA) 2. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, NTT (PHRI) 3. Himpunan Pramuwisata Indonesia, NTT (HPI) 4. Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu atau Pemusik Republik Indonesia, NTT (PAPPRI) 5. ASIDEWI 6. Komite Ekonomi Kreatif Prov NT	Data Olahan Disparekraf	
		13	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$	$\frac{59}{300} \times 100\% = 19,66\%$	Data Olahan Disparekraf	Target peserta tenaga kerja pariwisata yang disertifikasi berjumlah 300 orang, namun



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							karena terkendala refocusing anggaran maka kegiatan sertifikasi belum mencapai target.
		14	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	511 $\frac{\text{_____}}{770} \times 100\% = 66,36\%$	Data Olahan Disparekraf Bidang Kelembagaan	
		15	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	1. Lokasi pemberdayaan masyarakat : 1. Desa Fatumnasi, Kab TTS 2. Desa Uitiuh Tuan, Kab Kupang 3. Pokdarwis Liang Dara Desa Kenebibi 4. Pokdarwis Cunca Wulang 5. Pokdarwis Gua rangko 6. Pokdarwis Compang Lodok 7. Pokdarwis Batu Cermin 8. Pokdarwis Sano Limbung 9. Pokdarwis Wae Bobok 10. Pokdarwis Repi 11. Pokdarwis Rinca 12. Pokdarwis Puncak Eltari	Data Olahan Disparekraf Bidang Kelembagaan	Lokasi pariwisata estate 2020



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perindustrian & Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perindustrian	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIP	90%	Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov.NTT	Dokumen masih dalam bentuk draft RanPERDA, dimana masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk
		2	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yg diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yg masuk}} \times 100\%$	Tidak Ada		Selama tahun 2021 tidak ada permohonan pengajuan Izin Usaha (IU) Industri Besar, sehingga tidak ada rekomendasi (realisasi) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
		3	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri besar yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yg diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yg masuk}} \times 100\%$	Tidak Ada		Selama tahun 2021 tidak ada permohonan pengajuan Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar, sehingga tidak ada rekomendasi (realisasi) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
		4	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yg diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yg masuk}} \times 100\%$	Tidak Ada		Tidak ada permohonan & realisasi izin IUKI & IPKI lintas Kab/Kota selama tahun 2020
		5	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri besar \& perusahaan kawasan industri lintas Kab/Kota di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri besar \& perusahaan kawasan industri lintas Kab/Kota}} \times 100\%$	$\frac{2}{32} \times 100\% = 6,25\%$	SIINAS dan NTT Dalam Angka 2021	Berdasarkan data yang terinput ke dalam SIINAS, terdapat 2 perusahaan yang tergolong ke dalam Industri Besar Sedang (dari jumlah tenaga kerja)



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			kab/kota				
2	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yg memperoleh fasilitas promosi dagang}}{\text{Jumlah pelaku usaha yg membutuhkan fasilitas promosi dagang}} \times 100\%$	Tidak Ada		Kegiatan Fasilitas Promosi Dagang bagi pelaku usaha tidak dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2021.
		2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yg memperoleh fasilitas pengembangan produk}}{\text{Jumlah pelaku usaha yg membutuhkan fasilitas promosi dagang}} \times 100\%$	Tidak Ada		Kegiatan Fasilitas Pengembangan Produk tidak dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2021.
		3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yg memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}}{\text{Jumlah pelaku usaha yg membutuhkan pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}} \times 100\%$	$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$	Laporan Kegiatan 'Fasilitas Pembiayaan Ekspor' Bidang Pengemabangan Perdagangan Disperindag Provinsi NTT	
		4	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yg menjadi eksportir baru}}{\text{Jumlah pelaku usaha yg memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}} \times 100\%$	$\frac{0}{30} \times 100\% = 0\%$	Laporan Kegiatan 'Fasilitas Pembiayaan Ekspor' Bidang Pengemabangan Perdagangan Disperindag Provinsi NTT	Salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan Fasilitas Pembiayaan Ekspor adalah memfasilitasi akses pembiayaan (dari BNI). Dari 30
		5	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	Jumlah total pengaduan konsumen yang ditangani oleh Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan	0 Pengaduan Konsumen	Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Provinsi NTT	Selama tahun 2021 tidak ada pengaduan konsumen yang diterima dan ditangani oleh Dinas Provinsi
		6	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	Jumlah total konsumen yang mengikuti kegiatan edukasi konsumen dan jumlah pelaku usaha yang dibina oleh pemerintah daerah	Tidak Ada		Kegiatan Edukasi Konsumen pada awalnya telah dianggarkan dalam



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							DPA Dinas Perindag Prov NTT. Namun kemudian mengalami refocusing dan tidak jadi dilaksanakan
		7	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	6 Komoditi potensial	Bidang Pengembangan Perdagangan Disperindag Prov NTT	Pemantauan pertumbuhan dan pengembangan komoditi potensial dilakukan secara online di antaranya melalui BPS Provinsi
		8	Indeks Kinerja BPSMB	Indeks Kinerja BPSMB = Indeks SDM + Indeks Contoh Uji + Indeks Akreditasi	Tidak Ada	-	JPTD PSMB Provinsi NTT baru dibentuk pada bulan Juli 2020. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, UPTD PSMB belum.
		9	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah SIUP MB TBB yg terbit} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan SIUP MB TBB}} \times 100\%$	Tidak Ada	-	Penerbitan Bebas Bea SIUP Minuman Beralkohol (MB) merupakan wewenang Bea Cukai. Namun sepanjang tahun 2021 tidak ada rekomendasi SIUP MB bebas bea yang dikeluarkan oleh Disperindag Prov NTT
		10	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor yg terbit} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan rekomendasi SIUP MB bagi distributor}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov.NTT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT hanya memberikan rekomendasi penerbitan SIUP MB bagi distributor. Ijin dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.
		11	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah SIUP bahan berbahaya bagi pengecer yg diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 100\%$	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov.NTT	Pada tahun 2021 ada 1 permohonan SIUP Bahan Berbahaya yang diminta. Namun ketika diverifikasi di lapangan, alamat yang diberikan tidak sesuai. Sehingga verifikasi tidak dapat dilakukan, dan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							rekomendasi tidak dapat diterbitkan.
		12	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	$\frac{\text{Jumlah SIUP gol B \& C untuk pengecer \& penjual langsung minum di tempat yg terbit} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan SIUP MB gol B \& C untuk pengecer \& penjual langsung minum di tempat}} \times 100\%$	Tidak Ada	-	Pada tahun 2021 tidak ada rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT untuk penerbitan SIUP MB bagi Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat
		13	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yg terbit} \leq 1 \text{ hari kerja (1x24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yg dokumennya telah diterima dengan lengkap \& benar}} \times 100\%$	$\frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$	Bidang Pengembangan Perdagangan Disperindag Prov.NTT	
		14	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$	Tidak Ada		Pada tahun 2020, karena adanya refocusing kegiatan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi hanya dilaksanakan di 5 Kabupaten. Hal ini menyebabkan realisasi kinerja pupuk selama tahun 2021 tidak dapat dihitung (data RDKK merupakan data kumulatif Provinsi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTT). Namun, dari hasil pengawasan di 5 kabupaten ini, diperoleh bahwa semua kegiatan penyaluran pupuk yang dilakukan distributor sudah sesuai dengan target.
		15	Jumlah barang beredar yang diawasi	Jumlah barang beredar yang diawasi oleh Dinas yang menangani urusan perdagangan	37 Produk	Laporan Kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Pada tahun 2021 Pengawasan Barang Beredar terfokus pada pengawasan kadaluarsa (25 produk), Pengawasan Barang ber SNI



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						Disperindag Provinsi NTT	(8
		16	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani e.	$K = (a+b+c+d) \times 100\%$	Tidak Ada		Belum ada Pusat Distribusi Prov.NTT
		17	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	1. Beras Premium: 0%; 2. Gula Pasir Kristal Putih: 0,01%; 3. Minyak Goreng Kemasan Premium :0,0,8% 4. Daging Ayam Broiler: 0,07% 5. Telur Ayam Broiler: 0,04 % 6. Susu Bubuk : 0,06% 7. Jagung Pipilan: 0,04% 8. Daging Sapi: 0,45% 9. Tepung Terigu: 0,01% 10. Kacang Hijau: 0,06% 11. Mie Instant: 0,03% 12. Cabe Merah Besar: 0,41% 13. Cabe merah kriting: 0,37%	Bidang Pengembangan Perdagangan Disperindag Prov NTT	Laporan Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok di Kota Kupang tahun 2021, Bidang Pengembangan Perdagangan, Disperindag Prov NTT



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					14. Bawang Merah: 0,09% 15. Bawang Putih: 0,04% 16. kan segar bandeng: 0,06% 17. Garam Beryodium: 0% 18. Ketela Pohon:0% 19.		
		18	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	Persentase laporan harga harian yang disampaikan melalui sistem informasi harga Kementerian Perdagangan	100%		Penginputan dilakukan setiap hari sepanjang tahun 2021 pada aplikasi EWS KEMENDAG



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas ESDM Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ESDM

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ESDM	1	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Ada	Dinas ESDM Prov.NTT	Pasal 11 Perda No.11 Thn 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah
		2	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Tidak Ada	Dinas ESDM Prov.NTT	Perda No.11 Thn 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah
		3	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi (ada/tidak)	Ada	Dinas ESDM Prov.NTT	Pasal 47 Perda No.11 Thn 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah
		4	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi (ada/tidak)	Ada	Dinas ESDM Prov.NTT	Pasal 47 Perda No.11 Thn 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah
		5	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah (ada/tidak)	Ada	Dinas ESDM Prov.NTT	Pergub No. 48 Thn 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Prov.NTT
		6	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Ada	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		7	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi (ada/tidak)	Ada	Dinas ESDM Prov.NTT	Pergub No. 52 Thn 2017 tentang Tata Cara Perizinan Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam & Batuan di Prov.NTT



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	Perda/Pergub terkait IUJP	Perda/Pergub terkait IUJP (ada/tidak)	Tidak Ada		Merupakan kewenangan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
		9	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009 (ada/tidak)	Tidak Ada		Tidak ada Perda tetapi berupa Kep.Gubernur No.42/KEP/HK/2020 tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam & Batuan
		10	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan (jumlah)	Tidak Ada		Tidak ada permohonan izin
		11	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Tidak Ada		Bukan kewenangan Provinsi
		12	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Jumlah SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Tidak Ada		Tidak ada permohonan izin
		13	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan) (ada/tidak)	Ada	Dinas ESDM Prov.NTT	Pergub No. 117 Thn 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha di Bidang Ketenagalistrikan
		14	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Perda/Pergub terkait izin operasi dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan) (ada/tidak)	Ada	Dinas ESDM Prov.NTT	Pergub No. 117 Thn 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha di Bidang Ketenagalistrikan
		15	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Peraturan Gubernur terkait Penetapan (Penyesuaian) Tarif Tenaga Listrik Untuk Pemegang Izin yang Wilayah Usahanya Berada Dalam 1 Provinsi (ada/tidak)	Ada	Dinas ESDM Prov.NTT	Pergub No. 117 Thn 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha di Bidang Ketenagalistrikan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		16	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dari, dan penjualan kelebihan tenaga listrik kepada pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi (ada/tidak)	Ada	Dinas ESDM Prov.NTT	Keputusan Gubernur Nomor 143/KEP/HK/2018
		17	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	Jumlah izin usaha penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah	20 ijin usaha ketenagalistrikan	Dinas ESDM Prov.NTT	
		18	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	Total Penambahan Rumah Tangga Berlistrik	320 Unit	Dinas ESDM Prov.NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Trantibumlinmas

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRANTIBUMLINMAS	1	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Ada/tidak	Ada	BPBD Prov.NTT	Kajian Resiko Bencana
		2	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Ada/tidak	Ada	BPBD Prov.NTT	Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana)
		3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontinjensi provinsi	Ada/tidak	Ada	BPBD Prov.NTT	Dokumen Rencana Kontinjensi Kekeringan dan Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem
		4	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	BPBD Prov.NTT	1. Gladi Ruang Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem 2. Gladi Posko Rencana Kontinjensi Cuaca Ekstrem
		5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	BPBD Prov.NTT	4 Kabupaten/Kota (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Manggarai Barat)
		6	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Ada/tidak	Ada	BPBD Prov.NTT	Kajian Jitu Pasma
		7	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada/tidak (tim respon cepat)	Ada	BPBD Prov.NTT	SK Tim Respon Cepat
		8	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	Jumlah kegiatan (apabila ada)	10 kegiatan	BPBD Prov.NTT	Pencarian Korban yang hilang dan meninggal akibat badai siklon Seroja di Kabupaten Flores Timur, Lembata, Ende, Sikka, Alor, Sabu Raijua, Rote Ndao, Kupang, Malaka dan Kota Kupang.



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	Jumlah (apabila ada)	22	BPBD Prov.NTT	Beras 12.000 kg Dari BNPB : Makanan siap saji Famili Kids Perlengkapan Bayi, Ibu Hamil, Ibu Menyusui Makanan penambah daya tahan tubuh Hand Sanitizer Masker



2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

LAMPIRAN 2.2.2
2 (dua) Urusan

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pendidikan dan Kebudayaan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Atas}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{304.310}{401.600} \times 100\% = 75,77 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	$\frac{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus}}{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{2.679}{3.589} \times 100\% = 74,65 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{73}{73} \times 100\% = 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Kesehatan
2. Adm Kependudukan & Pencatatan Sipil
3. Pengendalian Penduduk & KB

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tamping rumah sakit rujukan di seluruh Provinsi}}{\text{Jumlah Penduduk Provinsi}}$	$\frac{1.104}{5.462.224} = 0,0002$	Laporan Seksi Yankes Rujukan	Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/036 3/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional, RS Rujukan di Provinsi NTT sebanyak 5 RS, yaitu : 1. RSUD Johannes Kupang (293 tempat tidur) 2. RSUD Gabriel Manek



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Atambua (216 tempat tidur) 3. RSUD Umbu Rara Meha (134 tempat tidur) 4. RSUD TC Hillers Maumere (216 tempat tidur) 5. RSUD Ben Mboy Ruteng (245 tempat tidur) Total : 1.104 tempat tidur Jumlah Penduduk NTT 2021 = 5.462.224 jiwa
		2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Laporan Seksi Yankes Rujukan	Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03//036 3/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Regional, RS Rujukan Provinsi di NTT berjumlah 1 (RSUD Johannes Kupang) dan sudah terakreditasi paripurna
		3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun $\frac{\text{Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$	462.939 _____ x100% 462.939 = 100%	Laporan Seksi Yankes Rujukan	Jumlah penduduk terdampak bencana seroja = 462.939
		4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$	66.237 _____ x 100% 66.237 = 100%	Lap.SPM. Tahun 2021 Seksi Survim	
2	Adm Kependudukan & Pencatatan Sipil	1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun $\frac{\text{Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun}}{\text{2 kali}} \times 100\%$	2 _____x100% 2 =100%	Lap. Tahunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	Data Agrerat Smtr I dan II



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Seluruh OPD Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{2}{39} \times 100\%$ = 5,12 %	Lap. Tahunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	2 OPD : PKS RSUD dan Diskominfo dari target Tahun 2021 sebanyak 10 OPD. Sedangkan jumlah total OPD sebanyak 39 OPD
3	Pengendalian Penduduk & KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i^f} \times k$	2,97	Susenas 2009, Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{244.944}{623.734} \times 100\%$ = 39,27 %	Pendataan Keluarga Tahun 2021, Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{-}{623.734} \times 100\%$ = - %		Tidak tersedia data Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Pekerjaan Umum
2. Perumahan Rakyat
3. Pertanahan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dinas PUPR	Tidak pada wilayah rawan banjir Luas kawasan permukiman yang ada di Wil.Sumba, Alor, Lembata dan Flores kepulaaun.
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan provinsi (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan provinsi (m)}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dinas PUPR	Tidak ada permukiman sepanjang pantai
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) di tahun eksisting (34.268,08 ha)}}{\text{Luas Daerah irigasi kewenangan Provinsi (60.328 Ha)}} \times 100\%$	56,80 %	Dinas PUPR	Thn 2020 : 33.004 Ha dan Thn 2021 : 34.268,08Ha
		4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/Kota (329 SR)}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/Kota di Provinsi bersangkutan (17.280 SR)}} \times 100\%$		BLUD SPAM	Alasan rendahnya capaian : - Sering terjadi kerusakan pada pompa sentrifugal (pompa air) karena usia pompa sudah mencapai 21 tahun pemakaian. - Terjadinya kerusakan pada pipa transmisi air baku (dari Bendungan Tilog ke Bak Prasedimentasi) akibat longsor saat Badai Seroja. - Terjadinya kerusakan pada pipa Distribusi Utama di Wilayah Jembatan Naimata akibat



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.90 %	Dinas PUPR	dari Badai Seroja. - Sering terjadi kerusakan pada gardu listrik si Tilog akibat dari kekurangan tegangan saat memompa air (daya listrik rendah & tegangan listrik tidak stabil). - Baru dilakukan Kerjasama BLUD SPAM dengan PDAM Kabupaten Kupang pada bulan November 2021, namun pemanfaatan air minum curah oleh PDAM Kabupaten belum maksimal.
		5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik regional -----X 100 % Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Dmestik regional	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov. NTT	Tidak terdapat kegiatan sistem Penyediaan Air Limbah domestik
		6	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan Provinsi yang mantap 1.897, 85 Km) -----X 100 % Panjang jalan keseluruhan di wilayah Provinsi (2.650 Km)	71,61 %	Dinas PUPR Prov. NTT	Data Kondisi terlampir
		7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah Provinsi	Tidak Ada	LPJK Provinsi Nasional	Sejak Ahir tahun 2020 LPJK Prov. Ditiadakan dan hanya ada LPJK Nasional. Pasal 40 Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020
2	Perumahan Rakyat	1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Tidak ada kegiatan penanganan rumah korban bencana
		2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga penerima fasilitas pengganti hak atas penguasaan tanah dan tau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	- Kegiatan tidak terlaksana km relokasi anggaran - Yang berwarna merah tidak ditangani oleh Dinas PUPR Prov. NTT



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan			
		3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan kumuh 10-15 ha}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	- Kegiatan tidak terlaksana krm relokasi anggaran - Angka 61,71 Ha adalah angka sementara review SK dari 9 Kab/Kota
		4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{\text{Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah satuan perumahan}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Kegiatan tidak terlaksana krm Refocusing
3	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas Tanah sesuai peruntukan ijin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Tidak terdapat ijin lokasi di tahun 2021 hanya perpanjangan penetapan lokasi
		2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$	Tidak ada	Dinas PUPR Prov.	PUPR hanya melakukan penetapan lokasi
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	$\frac{\text{Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi lintas Kabupaten/Kota}}{\text{Luas izin yang diterbitkan}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dinas PUPR Prov.	Tidak terdapat ijin lokasi hanya perpanjangan penetapan lokasi

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{492}{492} \times 100\%$ = 100%	Sat Pol PP	Dari surat masuk, pengaduan operasi penertiban pemantauan dan pengamanan serta patroli
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang; memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{9}{9} \times 100\%$ = 100 %	Sat Pol PP	Jumlah kasus yang diselesaikan sesuai pelanggaran Perda dan Perkada dan pelanggaran Perda dan Pergub



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Sosial Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Sosial

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam panti}} \times 100\%$	$\frac{1.112 \text{ klien}}{1.112 \text{ klien}} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial Provinsi NTT	- Panti Pemerintah Provinsi Tuna Netra Hitbia Kupang 50 Penerima Manfaat (APBD). - Panti Pemerintah Pusat BRSPDS Rungu Wicara Efata Kupang 23 Penerima Manfaat (APBN). 31 Panti swasta 1.039 Penerima Manfaat.
		2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di dalam apnti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti}}{\text{Jumlah anak terlantar di daerah Provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$	$\frac{1.583 \text{ klien}}{1.583 \text{ klien}} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial Provinsi NTT	- Panti Pemerintah Provinsi 270 Penerima Manfaat (APBD) : • Panti Anak Riang Naibonat 90 Penerima Manfaat. • Panti Taruna Harapan Lembata 90 Penerima Manfaat. • Panti Ora Et



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							Labora Waikabubak 90 Penerima Manfaat. - 132 Panti swasta 1.583 Penerima Manfaat.
		3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$	3.536 klien $\frac{3.536 \text{ klien}}{3.536 \text{ klien}} \times 100\%$ = 100%	Dinas Sosial Provinsi NTT	- Panti Pemerintah Provinsi 119 Penerima Manfaat (APBD) : • Panti Budi Agung Kupang 65 Penerima Manfaat. • Panti Paduwau Maumere 54 Penerima Manfaat. - 35 Panti swasta 3.417 Penerima Manfaat.
		4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis da dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$	--	--	Provinsi NTT tidak ada Panti Gelandangan dan Pengemis
		5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi}} \times 100\%$	$\frac{429}{429} \times 100\%$ = 100%	Dinas Sosial Provinsi NTT	- Bencana Alam 372 orang. - Bencana Sosial 57 orang.



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Tenaga Kerja
3. Transmigrasi

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{768}{4.282} \times 100\% = 17,93\%$	Dinas Koperasi, Nakertans Provinsi NTT	
		2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{8}{14.192} \times 100\% = 0,000563698\%$	Dinas Koperasi, Nakertans Provinsi NTT	
2	Tenaga Kerja	1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	Dinas Koperasi, Nakertans Provinsi NTT	
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{27}{6.771} \times 100\% = 0,4 \%$	Dinas Koperasi, Nakertans Provinsi NTT	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB Tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	$\frac{17.832.000.000.000}{2.810.000} \times 100\% = 634.590.747,331$	BPS Provinsi NTT	Data Kondisi Agustus 2021
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah,	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	$\frac{87}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Nakertans Provinsi	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan}}{\text{Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan}} \times 100\%$	5.859 = 1,49 %	NTT	
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	1.215 x100% 6.771 = 17,94 %	Dinas Koperasi, Nakertans Provinsi NTT	
		6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada tahun n}}{\sum \text{Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n}} \times 100\%$	774 x100% 5.859 = 13,21%		
3	Transmigrasi		-	-	-	-	-



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{6.225.135.930}{5.206.953.345.369} \times 100\%$ = 0,12 %	DP3A & Badan Keu	Rincian ARG pada Perangkat Daerah terlampir (yang menyusun GAP & GBS)
		2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani intansi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 10.000$	$\frac{356}{2.431.362} \times 10.000$ = 1,46%	DP3A (Aplikasi Simfoni)	Data Penduduk Anak adalah jumlah penduduk usia 0-19 thn di Tahun 2020 (sesuai data BPS)
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan di Provinsi}} \times 100.000$	$\frac{376}{2.797.235} \times 100.000$ = 0,13%	DP3A (simfoni dan BPS Prtovinsi)	Data Penduduk Perempuan 0-75+ Tahun 2020



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Pertanian
2. Pangan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas Panen}} \times 100\%$	$\frac{1.508.810}{404.118} \times 100\%$ = 311,66%	*Angka prediksi yang diolah data sementara BPS	
2	Pangan	1	Persentase Cadangan Pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Provinsi}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan provinsi}} \times 100\%$	$\frac{3.017.843}{652.382.325} \times 100\%$ = 0,46 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Peternakan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pertanian

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian	1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	$\frac{57.688 - 73.010}{73.010} \times 100\%$ $= -20,99 \%$	Data sekunder Dinas Peternakan Prov NTT	Dengan demikian kasus penyakit turun 20,99%. Data kasus penyakit diambil dari rincian jenis penyakit dan jumlah kasud di Kabupaten/Kota per Januari 2022



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Lingkungan Hidup
2. Kehutanan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan														
1	2	3	4	5	6	7	8														
1	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKLH Prov = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>Tahun</th><th>2020</th></tr><tr><td>IKA</td><td>59,78</td></tr><tr><td>IKU</td><td>89.90</td></tr><tr><td>IKTL</td><td>58.47</td></tr><tr><td>IKAL</td><td>70,14</td></tr><tr><td>IKLH</td><td>73,28</td></tr><tr><td>Status</td><td>Cukup</td></tr></table>	Tahun	2020	IKA	59,78	IKU	89.90	IKTL	58.47	IKAL	70,14	IKLH	73,28	Status	Cukup	Dokumen IKLH 2020 Dinas LHK Provinsi NTT (Seksi Tata Lingkungan dan Kehutanan)	Rincian Perhitungan di Laporan IKLH
		Tahun	2020																		
		IKA	59,78																		
IKU	89.90																				
IKTL	58.47																				
IKAL	70,14																				
IKLH	73,28																				
Status	Cukup																				
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penangungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi _____ x 100% Usaha dan atau kegiaitan dilakukan pemeriksaan	81 _____x100% 12 = 675%	Dinas LHK Prov. NTT	Pelanggaran dikarenakan tidak taat dalam penyampaian laporan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup (Penyampaian laporan setiap 6 bulan sekali)																
2	Kehutanan	1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal _____ x 100% Jumlah total usulan KTH yang terintegrasi	195 _____x 100% 655 = 29,77 %	Dinas LHK Provinsi NTT															
		2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak _____ x 100% Jumlah hutan keseluruhan	1.614,04 _____x100%	Dinas LHK Prov. NTT															



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.742.340 = 0,09 %		
		3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	$\frac{\text{Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)}}{\text{Luas lahan kritis di Provinsi (ha)}} \times 100\%$	1.236,41 $\times 100\%$ 840.765,10 = 0,15 %	Dinas LHK Prov. NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal per awal tahun tahun}} \times 100\%$	$\frac{196}{1.592} \times 100\% = 12,31 \%$	Indeks Membangun Kemendes PDT	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun} - \text{Jumlah desa berkembang per awal tahun tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang per awal tahun tahun}} \times 100\%$	$\frac{32,67}{1.181} \times 100\% = 2,77 \%$	Indeks Membangun Kemendes PDT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Perhubungan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perhubungan	1	Rasio konektivitas provinsi	Rasio konektivitas Provinsi = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ - IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) - IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhanlintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan	a. Rasio Konektifitas : - IK1 (Angkutan Jalan) = a. Jumlah trayek yang dilayani sebanyak 60 trayek b. Bobot trayek = 1 c. Jumlah Trayek yang ada = 597 Trayek Perhitungannya sebagai berikut : $\frac{60 \times 1}{597} = 0,10$ - IK2 (Angkutan Sungai, danau & Penyeberangan) a. Jumlah lintas penyeberangan = 44 lintasan b. Bobot Trayek = 0,5 $\frac{44 \times 0,5}{100} = 0,44$ - Bobot angkutan jalan = 70 - Bobot ASDP = 30 Jadi Rasio Konektifitas Provinsi adalah a. $IK1 \times 70 =$ $0,10 \times 70 = 7,04$ b. $IK2 \times 30 =$ $0,44 \times 30 = 13,2$	Sumber Data dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
		2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	V/C ratio di jalan Provinsi	Tidak ada		Telah diusulkan dalam Rencana Kerja,



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							tapi karena keterbatasan Anggaran maka usulan tersebut tidak diakomodir.



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Komunikasi dan Informasi, Statistik & Persandian

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Komunikasi dan Informasi	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yg terhubung dengan akses internet yg disediakan o/ Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{39}{39} \times 100\% = 100,00\%$	Dinas Kominfo Provinsi NTT	
		2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yg diselenggarakan secara online \& terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	$\frac{6}{9} \times 100\% = 66,66\%$	Dinas Kominfo Provinsi NTT	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan \& program prioritas pemerintah \& pemerintah daerah lainnya}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	$\frac{634.018}{5.325.566} \times 100\% = 11,91\%$	Dinas Kominfo Provinsi NTT	Perhitungan dilihat dari jumlah permohonan informasi, kunjungan website, kunjungan media sosial pada Dinas Kominfo Provinsi NTT
2	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yg menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo Provinsi NTT	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yg menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo Provinsi NTT	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo Provinsi NTT	Total skor Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Jumlah 3 Area Penilaian : Tata Kelola & Kerangka Kerja, Pengelolaan SD Persandian dan Operasional Persandian



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Penanaman Modal

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di Provinsi}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di Provinsi}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp. 4.721.208.516.807} - \text{Rp. 4.292.054.576.659.89}}{\text{Rp. 4.292.054.576.659.89}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Rp. 429.153.940.147}}{\text{Rp. 4.292.054.576.659.89}} \times 100\% = 10\%$	10%	DPMPTSP Prov.NTT	Capaian kinerja penanaman modal mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020 yg mencapai Rp.4.292.054.576.659.89 terdiri dari (PMDN: Rp3.604.375.743.581 dan PMA: Rp.1.116.832.773.226,00) Realisasi Investasi Tahun 2021 Rp. 4.721.208.516.807,00 terdiri dari (PMDN : Rp. 3.604.375.743.581,00 dan PMA Rp. 1.116.832.773.226,00) Capaian Kinerja terhadap Target RPJMD 94,42%



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kepemudaan & Olahraga Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kepemudaan & Olahraga

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepemudaan & Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg berwirausaha di Provinsi)}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Provinsi}} \times 100\%$	1.438 $\frac{\text{1.334.138}}{\text{1.438}} \times 100\%$ = 0,11%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Alokasi anggaran untuk pemberdayaan pemuda & pembinaan pemuda terbatas
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan & organisasi sosial kemasyarakatan di Provinsi)}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Provinsi}} \times 100\%$	3.081 $\frac{\text{1.334.138}}{\text{3.081}} \times 100\%$ = 0,23%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Alokasi anggaran untuk pengembangan pemuda & pembinaan pemuda terbatas
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	- Jumlah Perolehan Medali Kontingen NTT di (PON) XX di Papua 24 Medali dengan rincian : 5 Medali Emas, 10 Medali Perak dan 9 Medali Perunggu Dan dari 24 medali Atlet Binaan Dispora Pada PPLD/PPLMD memperoleh 13 Medali dengan rincian: 4 Medali Emas 3 Medali Perak 6 Medali Perunggu.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	- Kontingen Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua Tahun 2021 memperoleh 24 medali, dan Atlet Binaan Dispora pada sentral PPDL/PPLMD mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, dengan memperoleh 13 medali yaitu : 4 medali emas, 3 medali perak, dan 6 medali perunggu, dengan rincian : 1). Cabang Olahraga Kempo 2 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Medali perunggu, 2). Cabang Olahraga Muaythay : 1 Medali Emas, 3). Cabang Olahraga Pencak Silat 1 Medali



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Jumlah perolehan medali Kontingen NTT pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Papua.dengan perolehan medali 30 medali terdiri dari 5 medali emas 13 medali perak 12 medali perunggu	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. NTT	Emas, 2 Medali Perunggu, 4) Cabang Olahraga Tinju : 1 Medali Perak dan 1 Medali Perunggu. 5). Cabang Olahraga Atletik : 2 Medali Perunggu.. - .Kontingen Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di provinsi Papua. memperoleh medali 30 medali, dengan rincian :. 5 medali emas, 13 medali perak, dan 12 medali perunggu, dari Cabang Oalhraga Atletik



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kearsipan & Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$T = (100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 4$ $= 100\%$	Hasil olahan data yg dihimpun dari OPD Lingkup Pemprov.NTT & data Depo Arsip Dinas Arpus Prov.NTT	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	$T = (142,47\% + 149,68\% + 158,53\% + 168,65\% + 100\% + 0\%) / 6$ $= 119,89\%$	Hasil olahan data yg dihimpun dari OPD Lingkup Pemprov.NTT & data Depo Arsip Dinas Arpus Prov.NTT	
2	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	63,00%	Hasil kajian Perpustakaan Nasional RI	



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum \text{UPLM}}{\text{ALM}} \times 100\%$	11,80%	Hasil Kajian Perpustakaan Nasional RI	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Kelautan & Perikanan NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Kelautan & Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelautan & Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) 1. Produksi Tangkap (Ton) 2. Produksi Budidaya (Ton)	1. 183.554 ton* 2. 2.138.874,05 ton* *Data sementara	Satu Data KKP	(data terlampir)
		2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$X = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{ci}{si} \cdot 100\% \right)}{n}$ $X = \frac{\sum_{i=1}^{106} \left(\frac{10}{10} \cdot 100\% \right)}{106}$ Ket : X = Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku c_i = Jumlah pelaku usaha KP yg patuh s_i = Jumlah sampel pelaku usaha KP yg diperiksa i = Jenis komponen pelaku usaha KP n = Jumlah komponen pelaku usaha KP	100%	Satu Data KKP	Dimana : i = 6 n = 62.964 ci = 62.964 si = 6



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2020

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Pariwisata

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{10.390 - 54.276}{54.276} \times 100\%$ = -80,86%	Data Olahan Disparekraf	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{647.880 - 615.093}{615.093} \times 100\%$ = 5,33%	Data Olahan Disparekraf	
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yg terjual}}{\text{Jumlah kamar yg tersedia}} \times 100\%$	$\frac{41.567}{127.491} \times 100\% = 32,61\%$	BPS (diolah kembali oleh pusat data dan sistim informasi Kemenparekraf/Ba dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak melakukan perhitungan terkait tingkat hunian akomodasi.
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,53 % total pendapatan dari sektor penyediaan akomodasi & makan minum	BPS NTT (Laporan Bulan Data Sosial Ekonomi Provinsi NTT, Januari 2022)	Kontribusi sektor pariwisata secara keseluruhan merupakan komposit dari sektor penyediaan akomodasi & makan minum



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Perindustrian & Perdagangan

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perindustrian	1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun n} - \text{jumlah industri besar tahun n - 1}}{\text{Jumlah industri besar tahun n-1}} \times 100\%$	0%		Tidak ada penambahan Industri Besar sepanjang tahun 2021
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%	$\frac{100}{5} \% = 20\%$	Draft RPIP Prov.NTT	Ada 5 indikator dalam RPIP Prov.NTT
				Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%	1. Pertumbuhan sektor industri non-migas : $\frac{-5,54}{5,60} \times 20\% = 19,78\%$	Data BPS Prov NTT 2021 (Katalog: 6103028.53)	Data Katalog BPS 2021, namun berdasarkan data terupdate per Desember 2020.
					2. Kontribusi industri non migas dalam PDRB : $\frac{1,20}{1,38} \times 20\% = 17,39\%$	Data BPS Prov NTT 2021 (Katalog: 6103028.53)	
					3. Jumlah tenaga kerja sektor industri : $\frac{230,063}{183,367} \times 20\% = 25,09\%$	NTT dalam Angka 2021, Tabel 7.1.1, Tabel 7.2.2	Data jumlah tenaga kerja sektor industri meliputi sektor industri Besar dan Menengah serta Industri Mikro dan Kecil
					4. Nilai investasi sektor industri : $\frac{4.292.054.576.660}{6.715.000.000.000} \times 20\% = 12,78\%$	Data BPS Prov.NTT	Data BPS 'NTT Dalam Angka 2021



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					5. Nilai ekspor produk industri : 13.347.770 USD x 20% = 13,94% 19.144.955 USD	Data Neraca Perdagangan Luar Negeri NTT tahun 2021, update Data BRS November 2021, BPS Prov NTT)	
				Nilai Akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	= 49,42%		
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yg dipantau \& dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yg dikeluarkan}} \times 100\%$	Tidak Ada (6 perusahaan yang dipantau merupakan perusahaan yang sudah lama berdiri)		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT sepanjang tahun 2021 hanya melakukan pengawasan terhadap 6 perusahaan, namun tergolong dalam Industri Menengah (Data terlampir). Namun 6 perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah lama berdiri, bukan yang baru mengajukan ijin Usaha Industri Besar
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yg dipantau \& dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yg dikeluarkan}} \times 100\%$	Tidak Ada		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT sepanjang tahun 2021 tidak ada Izin Perluasan Industri (IPUI) yang dikeluarkan serta tidak melakukan Pengawasan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar.
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang	$\frac{\text{Jumlah izin yg dipantau \& dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yg dikeluarkan}} \times 100\%$	Tidak Ada		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT sepanjang tahun 2021 tidak ada Izin Kawasan Industri



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait				(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan serta tidak melakukan Pengawasan jumlah Izin Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI).
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	1) Keterkinian Informasi Industri: • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) 2) Kelengkapan informasi industri: • Informasi produksi dan kapasitas produksi = 10% • Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) TOTAL = 95 %	Data Rekapen Informasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, melakukan rekapen manual terkait data Industri secara lebih lengkap. Karena informasi dan Data Industri yang diinput ke dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) tidak menampilkan secara detail informasi dan data Industri.
2	Perdagangan	1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	$\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan} - \text{nilai ekspor non migas Tahun sebelumnya}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}} \times 100\%$	$\frac{13.347.770 \text{ US\$} - 14.994.798 \text{ US\$}}{14.994.798 \text{ US\$}} \times 100\% = -10,98\%$	Data Neraca Perdagangan Luar Negeri NTT tahun 2021, update Data BRS November 2021, BPS Prov NTT)	Data nilai ekspor non migas tahun berjalan (2021), merupakan keadaan sampai bulan November 2021
		2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yg ditangani \& diselesaikan Dinas Prov \& BPSK sesuai dg ketentuan yg berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yg ditangani \& diselesaikan Dinas Prov \& BPSK sesuai dg ketentuan yg berlaku dalam tahun berjalan}} \times 100\%$	Tidak Ada		Selama tahun 2021, tidak ada pengaduan konsumen yang ditangani oleh Dinas Perindustrian dan



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah pengaduan konsumen yg diterima dalam tahun berjalan			Perdagangan Provinsi NTT.
		3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel yg sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yg diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$	$\frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jumlah sampel yang diterima untuk diuji sebenarnya ada 13 sampel. Namun, ada 3 sampel yang belum bisa diuji sampai saat ini
		4	Tertib Usaha	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yg memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$	Tidak Ada		Pada tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan pengawasan Minuman Beralkohol (Tidak dianggarkan)dilaksanakan. Akan tetapi terkait legalitas & distribusi serta gudang penyimpanan terkait barang kebutuhan pokok dilaksanakan di 8 lokasi.
		5	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT dan Dinas Pertanian Provinsi NTT	Pada tahun 2020, karena adanya refocusing kegiatan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi hanya dilaksanakan di 5 Kabupaten. Hal ini menyebabkan realisasi kinerja pupuk selama tahun 2021 tidak dapat dihitung (data RDKK merupakan data kumulatif Provinsi yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTT). Namun, dari hasil pengawasan di 5 kabupaten ini, diperoleh bahwa semua kegiatan penyaluran pupuk yang dilakukan distributor sudah



No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
							sesuai dengan target.
		6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	$\frac{\text{Jumlah barang beredar yg diawasi sesuai dg ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yg diawasi}} \times 100\%$	$\frac{31}{37} \times 100\% = 83,78\%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT	pada tahun 2021 Pengawasan Barang Beredar terfokus pada pengawasan kadaluarsa (25 produk), Pengawasan Barang ber SNI (8 Produk) dan Pengawasan Khusus (4 Pelaku Usaha/Produk) yang masing tersebar pada 6 Kabupaten.
		7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KV_{pt} = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} sn}{p} \times 100\%$	$\frac{3.758,381}{24.716} \times 100\% = 15,20\%$	Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov.NTT	Laporan Data Harga Bahan Pokok di Kota Kupang tahun 2021, Bidang Pengembangan Perdagangan, Disperindag Prov NTT

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas ESDM Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: ESDM

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ESDM	1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Prov}} \times 100\%$	$\frac{0 \text{ IUP}}{0 \text{ IUP}} \times 100\% = 0\%$	Dinas ESDM Provinsi NTT	Merupakan kewenangan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
		2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	$\frac{\text{Jumlah desa yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	$\frac{3.214}{3.353} \times 100\% = 95,85\%$		



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Trantibumlinmas

No	Urusan Pemerintahan	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRANTIBUMLINMAS	1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yg disusun}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yg akan disusun}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	BPBD Prov.NTT	PB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan Rencana Kontinjensi Kekeringan, Renkon Cuaca Ekstrim
		2	Persentase penanganan pra bencana	$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yg terfasilitasi dalam penanganan pra bencana}}{\text{Jumlah Kab/Kota di wilayah Prov}} \times 100\%$	$\frac{7}{22} \times 100\% = 31,82\%$	BPBD Prov.NTT	Pelatihan Jitu Pasna (Kab SBD), Pelatihan TRC (2 Kab) Pelatihan DIM (Kota Kupang, Kab Kupang, Rote Ndao, Mabar)
		3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yg terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah Kab/Kota di wilayah Prov yg mengalami bencana}} \times 100\%$	$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$	BPBD Prov.NTT	22 Kab/Kota di Provinsi NTT



2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

LAMPIRAN 2.2.3
1 (satu) Urusan

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Pendapatan & Aset Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manajemen Keuangan	1	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	BPAD	



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru \& tenaga kesehatan (realisasi)}}{\text{Jumlah APBD (realisasi belanja APBD)}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp.628.104.313.525}}{\text{Rp.5.506.169.087.936,52}} \times 100\%$ = 11,41%	Badan Keuangan Daerah Prov.NTT	
		2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD (realisasi)}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp.1.146.698.846.831,32}}{\text{Rp. 27.443.000.000}} \times 100\%$ = 14.178,47%	Badan Keuangan Daerah Prov.NTT	
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realisasi)}}{\text{Jumlah belanja APBD (realisasi)}} \times 100\%$	$\frac{4.683.723.167.222,52 - 1.845.906.712.996,50}{5.506.169.087.936,52} \times 100\%$ = 51,54%	Badan Keuangan Daerah Prov.NTT	
		4	Opini Laporan Keuangan	(Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir)	Tahun 2010 s/d 2014 = WDP Tahun 2015 s/d 2020 = WTP	Badan Keuangan Daerah Prov.NTT	
		5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left(\frac{\text{nilai absolut dari total belanja dalam realisasi (perubahan)}}{\text{total belanja APBD (murni)}} - 1 \right) \times 100\%$	$\frac{5.506.169.087.936,52}{7.660.746.636.729} - 1 \times 100\%$ = -28,12%	Badan Keuangan Daerah Prov.NTT	

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left(\frac{\text{nilai absolut dari total PAD dalam realisasi (perubahan)}}{\text{total PAD dalam APBD (murni)}} - 1 \right) \times 100\%$	$\frac{1.146.698.846.831,32}{2.033.518.433.142} - 1 \times 100\%$ = -43,61%	Badan Keuangan Daerah Prov.NTT	
		7	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA 2020}}{\text{Total belanja APBD tahun sebelumnya 2019 (realisasi)}} \times 100\%$	$\frac{68.383.358.384}{5.755.258.016.193,64} \times 100\%$ = 1,19%	Badan Keuangan Daerah Prov.NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Inspektorat Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan & Keuangan	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Inspektorat Daerah Prov.NTT	Masih menggunakan Laporan SPIP Tahun 2019, karena Laporan SPIP (QA) 2021 belum dikeluarkan oleh BPKP
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3 DC	Inspektorat Daerah Prov.NTT	Sesuai Laporan Kapabilitas APIP (QA) 2021 dari BPKP Nomor : LQAPIP-499/PW24/2021 tanggal 31 Desember 2021

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Biro Pengadaan Barang/Jasa setda Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dgn nilai besar yg perlu pembangunan dalam 3 kuartal yg ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	105 Paket $\frac{\quad}{106 \text{ Paket}} \times 100\%$ = 99,10%	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2021	1. Jumlah kontrak konstruksi : 106 Paket 2. Jumlah paket 2021 dibawa ke tahun 2022 : 4 paket
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yg dilakukan dgn metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yg dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	2.154 Paket $\frac{\quad}{2.207 \text{ Paket}} \times 100\%$ = 97,60 %	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2021	1. Jumlah 4.361 Paket 2. Tender kompetitif : 2.154 paket 3. Tanpa kompetitif : 2.207 paket
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yg melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$	2.227.191.000.000 $\frac{\quad}{3.058.694.868.260} \times 100\%$ = 72,82%	Biro PBJ Setda Prov.NTT TA 2021	1. Nilai Belanja Langsung melalui pengadaan : Rp. 2.227.191.000,- 2. Total belanja barang dan jasa Rp.1.200.860.763.343,- 3. Nilai Belanja Modal : Rp.1.857.834.104.917,-

INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2020

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$	$\frac{5.489}{2.266} \times 100\% = 242,23\%$	Simpeg BKD Prov. NTT	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{468}{7.755} \times 100\% = 6,034\%$	Simpeg BKD Prov. NTT	
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{468}{468} \times 100\% = 100\%$	Simpeg BKD Prov. NTT	



INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2021

PROVINSI : Nusa Tenggara Timur
NAMA SKPD : Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi NTT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Fungsi Penunjang

No	FUNGSI PENUNJANG	NO	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transparansi & Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$	$\frac{398.069.000}{398.039.000} \times 100\% = 98,07\%$	Dinas Kominfo Provinsi NTT	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	$\frac{\text{Jumlah dokumen yg dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yg telah dirinci}} \times 100\%$	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo Provinsi NTT	Ada 7 akses terhadap informasi keuangan daerah yaitu : 1. Batang tubuh APBD TA 2021; 2. Lampiran II Perubahan APBD TA 2020; 3. Pergub ASB No 16 Tahun 2020; 4. Ringkasan Perubahan APBD TA 2020; 5. Lampiran APBD TA 2021; 6. Batang Tubuh Perubahan APBD TA 2020; 7. Ringkasan APBD TA 2021.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sebagai wujud nyata komitmen Kepala Daerah terhadap amanah yang telah diberikan oleh masyarakat adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD secara periodik. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 terdapat 22 (dua puluh dua) Sasaran strategis yang diperjanjikan sebagai penjabaran dari 5 (lima) Misi pembangunan daerah, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk pada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

Sasaran Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan Strategis 1 : berkelanjutan

Sasaran 1, mencakup tiga (3) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	-0,83	5,87	2,51	42,76	6,7	37,46
2.	Laju Inflasi	%	0,32	3	0,89	170,33	3	170,33
3.	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	19,99	20-23	20,58	102,9	25-27	82,32
Rata-rata Capaian						105,33		

Sumber data: Provinsi NTT dalam Angka 2022-BPS Prov.NTT

Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ **Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

Pandemi Covid-19 masih menjadi faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya target yang ditetapkan. Perbaikan yang terjadi pada Tahun 2021 menggambarkan kondisi perekonomian di Nusa Tenggara Timur semakin membaik seiring kondisi pandemi Covid-19 yang semakin membaik. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebesar Rp. 110,89 Triliun. Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,17 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 68,95 persen.

❖ **Laju Inflasi**

Pada Bulan Desember 2021 Inflasi NTT tercatat 0,89 dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,76. Untuk Kota Kupang, laju inflasi adalah 0,96 dengan nilai IHK 105,44, laju inflasi Kota Maumere sebesar 0,34 dengan IHK sebesar 106,86, dan laju inflasi Kota Waingapu sebesar 0,96 dengan IHK sebesar 107,35. Realisasi Inflasi Desember 2021 di Nusa Tenggara Timur terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 9 dari 11 kelompok pengeluaran.



Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi yang naik sebesar 3,32 persen.

❖ PDRB Per Kapita

Pada Desember 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya sebesar Rp 20,58 juta per tahun pada 2021 atau sepertiga rerata pendapatan penduduk Indonesia sebesar Rp 62,2 juta per tahun. Kondisi ini menempatkan Provinsi NTT pada urutan terbawah PDRB Provinsi di Indonesia disusul Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada urutan 33 dengan PDRB Perkapita sebesar Rp. 26 juta per tahun dan Provinsi Maluku pada urutan 32 dengan PDRB Perkapita sebesar Rp. 26,07 juta per tahun.

Sasaran Berkurangnya kemiskinan

Strategis 2:

Sasaran 2, mencakup tiga (3) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	%	21,21	21-19,63	20,9	100,48	15-12	60,67
2.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	1,24	1,05	1.44	62,86	0,85	30,39
3.	Indeks Kedalam Kemiskinan	Poin	4.15	4,02	4,79	80,85	3,40	59,12
Rata-rata Capaian						81,39		

Sumber data: Provinsi NTT dalam Angka 2022-BPS Prov.NTT



Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Tahun 2021, jumlah penduduk miskin mengalami sedikit penurunan dari 21,21 menjadi 20,9 persen atau sebanyak 1,16 juta orang. Di tingkat Nasional, Provinsi NTT menduduki peringkat ke-32 Nasional dengan nilai IPM 65,28 di tahun 2021. Pandemi Covid-19 masih merupakan faktor utama penyebab lambatnya penurunan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan.

❖ Indeks keparahan kemiskinan

Indeks Keparahannya Kemiskinan naik dari 1,24 pada September 2020 menjadi 1,44 pada September 2021. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak sektor mengalami kontraksi. Kontraksi yang terjadi berkorelasi lurus dengan pendapatan dan kesejahteraan. Pendapatan yang relatif menurun, hasil produksi relatif tetap, tidak adanya lapangan kerja baru, jumlah penduduk bertambah, pengurangan tenaga kerja/ PHK, harga barang naik, dan turunnya daya beli masyarakat ternyata meskipun pengaruhnya kecil namun tetap mempengaruhi jumlah penduduk miskin dan keparahan kemiskinan.

❖ Indeks kedalaman kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di NTT naik dari 4,16 pada September 2020 menjadi 4,79 pada September 2021. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sasaran Strategis 3 : Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas angkatan kerja

Sasaran 3 mencakup empat (4) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK)	%	4,28	3,2-2,6	3,77	82,19	1,9-1,5	1,8
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73,11	69,85	73,78	105,63	69,76	105,76
3.	Produktivitas Total Daerah	Rp. Juta	37,40	46,583	37,99	81,56	50,360	75,44
4.	Cakupan Pekerja Tanpa Upah yang dibandingkan Penduduk yang berkerja	%	24,36	24,36	25,92	93,61	21.02	76,71
	Rata-rata Capaian					87,93		

Sumber data: *Provinsi NTT dalam Angka 2022-BPS Prov.NTT*

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka turun pada tahun 2021 sebesar 1,51% dari tahun sebelumnya sebesar 4,28 % menjadi 3,77%. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja yang telah dipekerjakan kembali paska PHK yang dilakukan pada Tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.

❖ Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2021 adalah sebesar 73,78%. Kondisi ini menggambarkan persentase banyaknya angkatan kerja usia di atas 15 tahun berbanding dengan jumlah penduduk usia di



atas 15 tahun. Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2021 adalah sebesar 2.918.548 orang dengan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan), dengan jumlah pekerja sebanyak 1.414.841 orang.

❖ Produktifitas total daerah

Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas Total Daerah merupakan output yang mampu dihasilkan oleh setiap angkatan kerja dalam 1 tahun. Dari jumlah Angkatan kerja sebesar 2.918.548 pada tahun 2021, produktivitas total daerah Provinsi NTT mencapai Rp. 37,99 Juta atau mencapai 81,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 46,58 Juta.

❖ Cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja

Dari jumlah angkatan kerja sebesar 2.918.548 pada tahun 2021, jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dengan dengan status pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga) sebanyak 756.386 orang. Cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja sebesar 25,92% Diharapkan pada akhir periode RPJMD Cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja menurun sampai dengan 21.02%.

Sasaran Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
Strategis 4 :

Sasaran 4 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	20,64	25,31	23,30	92,08	39,74	58,64
Capaian					92,08		

Sumber data: LKIP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021



Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ Persentase PAD terhadap total pendapatan

Realisasi Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Tahun 2021 adalah sebesar 23,30%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar 2,01%. Rincian Pendapatan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT
Keadaan 1 Januari s/d 31 Desember 2021

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI (Rp)
4	PENDAPATAN	5,881,616,887,272.00	5,312,446,872,608.51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,672,063,318,672.00	1,238,032,648,888.51
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	1,283,442,229,906.00	925,862,559,388.00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	102,148,474,750.00	69,890,857,732.45
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	64,732,172,050.00	64,982,172,050.00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	221,740,441,966.00	177,297,059,718.06
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	4,124,996,231,200.00	4,000,655,446,445.00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,124,996,231,200.00	4,000,655,446,445.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84,557,337,400.00	73,758,777,275.00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	84,557,337,400.00	73,758,777,275.00

Sumber data: LKIP Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 (Data Sebelum Audit BPK)

Sasaran Strategis 5: Menguatnya Peranan NTT Dalam Perdagangan Regional

Sasaran 5 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Rasio Ekspor Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Poin	11,16	61,29	11,48	18,73	63,10	18,19
Capaian					18,73		

Sumber data: Provinsi NTT dalam Angka 2022-BPS Prov.NTT



Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- ❖ Rasio ekspor impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)

Neraca perdagangan luar negeri di Provinsi NTT Tahun 2021 mengalami defisit sebesar US\$ 30,30 juta. Nilai ekspor mencapai US\$ 20,82 juta, meningkat dibanding tahun 2020. Komoditas ekspor dengan nilai terbesar adalah HS 25 Garam, Belerang, Kapur yaitu senilai US\$ 4,64 juta dengan volume sebesar 27.455,17 ton. Timor Leste merupakan satusatunya negara tujuan ekspor pada Tahun 2021. Nilai impor NTT tahun 2021 sebesar US\$ 51,12 juta, naik signifikan dari nilai import tahun 2020 sebesar US\$ 34,65 juta. Komoditas impor terbesar adalah HS 27 Bahan Bakar Mineral dengan nilai US\$ 25,51 juta. Malaysia adalah negara asal impor dengan nilai terbesar yaitu US\$ 14,27 juta dan volume sebesar 35.042,82 ton. Berdasarkan nilai kumulatif ini rasio ekspor impor terhadap PDB adalah sebesar 11.48%. Sumbangan terbesar untuk PDB NTT tahun 2021 adalah dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 29,17%. Berikutnya adalah dari lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan 13,41 %.

Sasaran Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat
Strategis 6 :

Sasaran 6 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat							
Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Rasio Ketergantungan	Orang	64,89	63,50	54,88	113,57	62,08	111,60
Capaian					113,57		

Sumber data: <https://ntt.bps.go.id/indicator/12/1062/1/angka-beban-ketergantungan-menurut-kabupaten-kota-dan-daerah-tempat-tinggal.html>

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- ❖ Rasio ketergantungan

Pada Tahun 2021 Rasio Ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 54.88 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 55 penduduk usia non produktif



(kurang dari 15 tahun dan di atas 65 tahun). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan tanggungan sebesar 10 orang.

Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan

Sasaran 7 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja							
Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	67,30	67	67,9	101,34	88	77,16
Capaian					101,34		

Sumber data: LKIP Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Prov. NTT Tahun 2021

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ **Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Skor pola pangan harapan menggambarkan tingkat keberagaman konsumsi masyarakat. Adapun angka ideal bagi skor pola pangan harapan (PPH) adalah 100 poin. Untuk mencapai angka ideal 100 poin apabila pola konsumsi penduduk NTT telah mencapai pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Realisasi pencapaian skor pola pangan harapan pada Tahun 2021 adalah sebesar 67,90 poin. Dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada penurunan konsumsi energi. Pembatasan aktivitas masyarakat, pekerja yang dirumahkan dan diberhentikan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat daya beli akan pangan menjadi berkurang/menurun dan berdampak pada tingkat konsumsi pangan yang belum bervariasi/ beragam.

Sasaran Strategis 8 : Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah

Sasaran 8 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Indeks Gini	Poin	0,36	0,35-0,34	0.34	103.14	0,34 - 0,32	94.06
Capaian						103.14		

Sumber data: Provinsi NTT Dalam Angka 2022, BPS Provinsi NTT Tahun 2022

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- ❖ Indeks Gini

Indeks Gini di atas menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapata dalam masyarakat di NTT. Angka ini tergolong “Ketimpangan Sedang”. (0=Pemerataan sempurna; 0>≤0,3= Ketimpangan rendah; 0,3>≤0,5= Ketimpangan Sedang; 5>≤ 1= Ketimpangan tinggi). Pada Tahun 2021, Indeks Gini Provinsi NTT sebesar 0,34 atau turun 0,02 poin dari tahun sebelumnya.

Sasaran Terjaminnya keadilan dan perlindungan terhadap Strategis 9 : perempuan dan anak

Sasaran 9 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	92.73	94	92.63	98.54	95	97.53
2.	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	74.53	70.76	74.53	105.32	74,76	99.63
3.	Persentase Kekerasan Terhadap Anak Yang Tertangani	%	63	75	100	133.33	100	100
4.	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	%	60	75	100	133.33	100	100
Rata-rata Capaian						117.63		

Sumber data: LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov.NTT Tahun 2021, Provinsi NTT Dalam Angka 2022, BPS Provinsi NTT Tahun 2022



Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Indeks Pembangunan Gender pada Tahun 2021 berada pada 92,63 poin

❖ Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen. Data IDG terakhir dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT pada Tahun 2020 dengan indeks 74,53 poin.

❖ Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani

Pada tahun 2021, persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani sebesar 100%. Meningkatnya penyelesaian atas berbagai kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan semakin tingginya kesadaran dan dukungan masyarakat yang diberikan kepada aparat kepolisian atau pemerintah desa untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan anak. Kesadaran tersebut timbul akibat masyarakat menyadari anak memiliki hak asasi yang sama di antaranya hak memperoleh kehidupan dan perlakuan yang adil, tidak ada intimidasi atau mengalami kekerasan fisik maupun non fisik. Bentuk perhatian pemerintah dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak adalah melaksanakan program membangun desa/kelurahan layak anak yang sebelumnya tidak ada maka saat ini sudah terbangun 163 desa/kelurahan layak anak yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Lembata, Sikka Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai Barat, Belu, Kupang dan TTU. Selanjutnya, pemerintah membentuk satgas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di setiap Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, Pol-PP, Banbinsa, Pospol, Polsek, Polres dan berbagai lembaga non pemerintah pemerhati tenaga kerja; serta peningkatan peran dan pemberdayaan gender. Pemerintah menyadari bahwa kemiskinan juga

berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminal termasuk kekerasan terhadap anak, sehingga alokasi dana pengembangan ekonomi bagi UKM dan usaha ekonomi produktif yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, kesejahteraan sosial, pendidikan, peternakan.

❖ Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani Pada tahun 2021 sebesar 100%. Meningkatnya penyelesaian atas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan semakin tingginya kesadaran dan dukungan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan perempuan.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian misi **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”** sebesar **91.24%**, yang didukung dengan sembilan sasaran dan 53 (lima puluh tiga) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.519.667.966.876,00 dan realisasi Rp. 3.334.669.878.326,00 atau mencapai 73,78% sampai dengan akhir tahun.

Misi 2 : MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (*RING OF BEAUTY*)

Pariwisata merupakan masa depan ekonomi karena mempunyai *multiplier-effect* yang banyak. NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. NTT merupakan provinsi dengan destinasi unggulan terbanyak dan menjadi destinasi super prioritas di Indonesia, menjadi pilihan utama wisata dunia akhir-akhir ini. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional. NTT yang kaya akan aset alam dan budaya dengan 1.192 pulau dan 1.378 destinasi wisata dengan segala otentisitas keunikannya baik daratan maupun perairan merupakan rangkaian cincin keindahan (*ring of beauty*). Untuk itu Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Pariwisata sebagai *prime mover*/penggerak utama pembangunan ekonomi. Kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, obyek dan daya tarik wisata serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala.



Keberhasilan pengembangan kepariwisataan dapat diukur dari jumlah kunjungan wisatawan ke suatu daerah. Misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam mewujudkan NTT Bangkit menuju masyarakat NTT sejahtera.

Sasaran **Pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur**
Strategis 1 : **5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accomodation, Amenities dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan**

Sasaran 1 mencakup 3 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,56	0,76	0,55	72,37	0,78	70,51
2.	Share Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	11,16	12,12	11,48	96,57	12,23	94,72
3.	Share Lapangan Usaha Jasa Lainnya terhadap PDRB	%	1,83	2,23	1,69	75,78	2,45	68,99
Rata-rata Capaian Sasaran						81.57		

Sumber data: BPS NTT Tahun 2022

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- ❖ Share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB

Pada Tahun 2021 kontribusi / share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar 0,55%, turun sebesar 0,01% dari Tahun 2020 sebesar 0,56%. Kontribusi ini memberikan sumbangsih sebesar Rp. 613,698 miliar, naik sebesar Rp. 20,09 miliar dari Tahun 2020 sebesar Rp. 593,59 miliar walaupun realisasi presentasenya turun. Kenaikan ini dipicu oleh kembali dibukanya oyek pariwisata. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,78 % maka capaiannya sebesar 70,51



❖ Share sektor perdagangan terhadap PDRB.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar 11,48%, naik sebesar 0,32% dari Tahun 2020 sebesar 11,16%. Kontribusi ini memberikan sumbangsih sebesar Rp. 12.724 miliar, naik sebesar Rp. 836 miliar dari Tahun 2020 sebesar Rp. 11.888 miliar. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 12,23 % maka capaiannya sebesar 84,72%.

❖ Share lapangan usaha jasa lainnya terhadap PDRB

Pada Tahun 2021 kontribusi Lapangan Usaha Jasa Lainnya terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar 1,69%, turun sebesar 0,14% dari Tahun 2020 sebesar 1,83%. Kontribusi ini memberikan sumbangsih sebesar Rp. 1.870 miliar, turun sebesar Rp. 76 miliar dari Tahun 2020 sebesar Rp. 1.946 miliar. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,45 maka capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD sebesar 68,98 %.

Tabel 2.13
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Pendapatan Regional Bruto 2020-20221

No	Lapangan Usaha / Sektor	PDRB ADHB				Meningkat/ Menurun	
		2020		2021			
		(%)	(Miliar Rupiah)	(%)	(Miliar Rupiah)	(%)	(Miliar Rupiah)
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB.	0,56	593,59	0,55	613,68	-0,01	20,09
2.	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran	11,16	11.888	11,48	12.724	0,32	836
3.	Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Lainnya terhadap PDRB	1,83	1.946	1,69	1.870	-0,14	-76

Sumber: BPS, NTT Dalam Angka 2022

Sasaran Menguatnya sumbangan pariwisata terhadap
Strategis 2 : perekonomian daerah

Sasaran 2 mencakup tiga (3) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Pertumbuhan UKM dan IKM di daerah wisata	%	2	4	6	150	8	75
2.	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,71	4	2,73	68,25	4	68,25
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.057.384	1.065.378	658.270	61,79	1,534,144	42,91
Rata-rata Capaian Sasaran						93,35		

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2022

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ **Pertumbuhan UKM dan IKM di daerah pariwisata**

Salah satu kontribusi dari sector pariwisata terhadap perekonomian daerah adalah bertumbuhnya UKM dan IKM di daerah wisata. Realisasi pertumbuhan UKM dan IKM di daerah wisata tahun 2021 sebesar 6 % (86.928 jenis usaha) dari target 4 % sehingga capaiannya 150% atau mengalami kenaikan 4% (5.216 jenis usaha) dari capaian tahun 2021 sebesar 2 % (81.712 jenis usaha). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 8 % maka capaiannya 75 %.

Tabel 2.15
Data Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata Tahun 2021

NO	TOTAL BERDASARKAN SUB SEKTOR	PERSENTASE	KETERANGAN
1.	Kuliner	64,62	- Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif Tahun 2021 89.928 buah - Jumlah Usaha Ekonomi Kretif Tahun 2020 81.712 buah
2.	Kria	12,73	
3.	Fesyen	16,82	
4.	TV dan Radio	0,23	
5.	Penerbitan	2,34	
6.	Musik	0,45	
7.	Arsitektur	1,04	
8.	App & Games	0,07	
9.	Periklanan	2,34	
10.	Fotografi	0,94	



NO	TOTAL BERDASARKAN SUB SEKTOR	PERSENTASE	KETERANGAN
11.	DKV	0,00	
12.	Seni Pertunjukan	0,20	
13.	Desain Produk	0,02	
14.	Seni Rupa	0,29	
15.	Film, Animasi, Video	0,06	
16.	Desain Interior	0,11	

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022

❖ **Lama tinggal wisatawan**

Lama tinggal wisatawan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan keberhasilan suatu daerah memanfaatkan sektor wisata sebagai peluang perkembangan ekonomi. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Lama tinggal wisatawan di NTT Tahun 2021 adalah 2,73 hari dari target 4 hari sehingga capaiannya 68,25 % atau naik 0,02 hari dari capaian Tahun 2020 sebesar 2,71 hari. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 4 hari maka caapihan 2021 terhadap target akhir RPJMD sebesar 68,25 persen.

❖ **Jumlah kunjungan wisatawan**

Salah satu variabel untuk mengukur keberhasilan sektor pariwisata di suatu daerah adalah meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan. Tantangan industri pariwisata saat ini adalah bagaimana cara meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan di tengah pandemi covid’19. Jumlah kunjungan wisatawan di NTT Tahun 2021 sebanyak 658.270 orang dari target 1.065.378 orang sehingga capaiannya sebesar 61,79 %. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang mencapai 1.057.384 orang maka terjadi penurunan 399,114 orang. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 42,91 maka capaian Tahun capaian 2021 terhadap target akhir RPJMD sebesar 42,91%.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian misi **“Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of Beauty)”** sebesar **87,46%**, yang didukung dengan dua sasaran dan 7(tujuh) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.131.342.388,00 dan realisasi Rp. 5.313.301.447,00 atau mencapai 86,66% sampai dengan akhir tahun.



**Misi 3 : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR
UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial, ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolasi.

**Sasaran Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah
Strategis 1 : dan keluar daerah**

Sasaran 1, mencakup tiga (3) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	73,94	100	6,73	76,83	100	76,83
2.	Dwealing Time Pelabuhan	hari	0	4	4	100	3	100
3.	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	0	9,08	10,05	111	74,81	100
Rata-rata Capaian Sasaran						95,94		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, LKIP Dinas Perhubungan Provinsi NTT, 2021

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

- ❖ Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
Peningkatan jalan provinsi yang ditangani pada Tahun 2021 yaitu 178,43 Km atau 6,73% dari target 694,45 Km atau 100%. Total panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Tahun 2020 yaitu 1.959,5 Km atau 73,94 %, sehingga capaian panjang jalan provinsi kondisi mantap sampai Tahun 2021 yaitu 2.036,01 Km atau 76,83 % dari total panjang jalan provinsi 2.650 Km. Berdasarkan hasil survey kondisi jalan Tahun 2021, kondisi mantap jalan mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sepanjang 1.857,58 Km atau 70,11 % menjadi 1,897,85 Km atau 71,61%.



Realisasi pelaksanaan capaian indikator ini dibiayai dari dana DAU sepanjang 1,40 km, dana DAK sepanjang 19 km, dan PHJD sepanjang 16,73 km. DAK lanjutan tahun 2020 sepanjang 4 km dan kegiatan lanjutan SMI tahun 2020 sepanjang 137,30 km.

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap tergolong belum mencapai target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2021, yaitu :

1. Percepatan proses lelang mendahului waktu penandatanganan MoU.
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi konsultan pengawas sebagai pihak ketiga yang dikontrak untuk mengendalikan proses pekerjaan fisik secara administrasi dan teknis (kualitas dan kuantitas) agar hasil pekerjaan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat sasaran.
3. Koordinasi keuangan.

❖ Dwealing Time Pelabuhan

Indikator Dwealing time pelabuhan merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas Pehubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023. Realisasi Dwealing time pelabuhan atau waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan yang ditetapkan sesuai dengan standar pelayanan minimal sebanyak 4 hari dari target Tahun 2021 adalah 4 hari. sehingga target dan realisasi capaian Dwealing time pelabuhan Tahun 2021 adalah 100% atau dikategorikan sangat berhasil. Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator kinerja Dwealing time pelabuhan memenuhi target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2021, yaitu :

1. Untuk meningkatkan pengawasan di Pelabuhan khususnya kegiatan bongkar/muat (dwealing time) maka penambahan anggaran pada kegiatan pengawasan ini sangat perlu sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat pengguna serta enimbulkan biaya / coast yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna karena lamanya waktu bongkar/muat di pelabuhan.

- Menjaga komunikasi dengan petugas-petugas yang berada di pelabuhan dan UPT Kementerian yang memiliki wilayah kerja Pelabuhan Target serta BUMN Penyelenggara Kegiatan Bongkar/Muat Peti Kemas di Pelabuhan agar kegiatan pelayanan tetap berjalan dengan baik.

❖ **Cakupan Pelayanan Angkutan Darat**

Indikator Cakupan Pelayanan Angkutan Darat merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas Pehubungan Provinsi NTT Tahun 2019-2023. Realisasi jumlah trayek yang dilayani oleh angkutan umum AKDP sebanyak 60 trayek melebihi target yang ditetapkan Tahun 2021 sebanyak 59 trayek. Pada Tahun 2021 sebanyak 597 trayek AKDP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 111 Tahun 2019 namun sampai dengan Tahun 2020 trayek-trayek yang ditetapkan belum dilayani oleh angkutan baik perintis maupun eksekutif. Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator kinerja Dwealing time pelabuhan melebihi target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2021, yaitu : Pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan-kegiatan ini sehingga ketersediaan angkutan umum dalam rangka pemerataan pelayanan transportasi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik.

Sasaran Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung Strategis 2 : peningkatan produksi pertanian

Sasaran 2 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Bagi Petani	%	54,71	28,84	7,26	58,80	78,46	58,80
Capaian Sasaran					58,80		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, 2021



Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ **Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Bagi Petani**

Target Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Bagi Petani Tahun 2021 adalah sebesar 28,84% atau 17.398,59 Ha dari total luas DI Kewenangan Provinsi. Dari penanganan yang dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa Daerah Irigasi, dapat terealisasi sebesar 7,26% atau sepanjang 1.264,08 Ha. Capaian Tahun 2021 adalah sebesar 58,80% atau 34.268,08 Ha dari total luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi.

Untuk Indikator Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Bagi Petani, dilakukan melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi, dimana upaya peningkatan ini dilakukan pada Daerah Irigas Kewenangan Provinsi dengan tujuan untuk memaksimalkan kembali fungsi layanan jaringan irigasi untuk menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan petani. Upaya peningkatan diasumsikan juga sebagai pembangunan kembali jaringan irigasi atau saluran-saluran irigasi pada Daerah Irigas Kewenangan Provinsi.

Adapun jenis penanganan di Tahun 2021 melalui kegiatan antara lain :

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aroki di Kabupaten TTU (1.242 Ha).
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Luwurweton di Kabupaten Ngada (1.000 Ha).
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Melolo di Kabupaten Sumba Timur (1.215 Ha).
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces di Kabupaten Manggarai (2.750 Ha).
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Weliman di Kabupaten Malaka (1.000 Ha).
6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Satar Lenda di Kabupaten Manggarai (DPAL) (1.525 Ha).
7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wae Ces 1-4 di Kabupaten Manggarai (DPAL) (2.750 Ha).

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAU) :

1. Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Loli di Kabupaten Sumba Barat (2.390 Ha).
2. Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Manubulu di Kabupaten Rote Ndao (1.250 Ha).



3. Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Mataiyang di Kabupaten Sumba Timur (1.579 Ha).
4. Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat (2.653 Ha).

Rehabilitasi Jaringan Irigasi (IPDMIP-LOAN) :

1. Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Wae Ganggang di Kabupaten Manggarai Barat (1.281 Ha).
2. Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Wae Mokol I, II di Kabupaten Manggarai Timur (2.499 Ha).
3. Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi Sederhana D.I. Wae Racang I, II di Kabupaten Manggarai Barat (1.200 Ha).

Sasaran Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan
Strategis 3 : layak, air minum dan sanitasi

Sasaran 3 mencakup tiga (3) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.18 Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Penambahan Rumah Layak Huni	Unit	0	15.498	21.576	139,21	47,948	35.550
2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak	%	0	83	82	98,80	100	98,80
3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	0	77	69,7	90,52	100	90,52
Rata-rata Capaian Sasaran						109.51		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, 2022

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ **Penambahan Rumah Layak Huni**

Indikator Penambahan Rumah Layak Huni merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2019-2023. Realisasi Penambahan Rumah Layak Huni Tahun 2021 adalah sebesar 21.576 unit atau 45% dari target 15.498 unit, sehingga capaian Penambahan Rumah Layak Huni Tahun 2021 sebesar 139,21%. Penanganan RTLH sampai dengan tahun 2020 tidak dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Data ter up date sampai dengan Tahun 2019 jumlah penanganan RTLH adalah 12.773 yang merupakan akumulasi penanganan secara kolaboratif melalui sumber dana APBN maupun APBD. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2021, yaitu kerjasama dengan lembaga terkait.

❖ Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak

Indikator Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2019-2023. Realisasi Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak Tahun 2021 adalah sebesar 82% dari target 83%, sehingga capaian Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak Tahun 2021 sebesar 98,80%. Untuk mencapai realisasi cakupan akses air minum layak tingkat Provinsi maka diperlukan kolaborasi dari berbagai sumber pendanaan. Untuk Tahun 2021 dari dana APBD Provinsi sendiri belum dapat mengkomudir capaian terhadap akses air minum layak karena kegiatan yang dilakukan di Tahun 2021 ini sebagian besar merupakan kegiatan yang pelaksanaannya bersifat multi years yang realisasinya baru dapat terukur di Tahun 2022. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2021 yang bersifat multi years terdiri dari 19 kegiatan yang tersebar di beberapa kabupaten. Untuk penyiapan pembangunan jaringan air minum selanjutnya pada Tahun Anggaran 2021 juga dilakukan penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) di 3 Wilayah yaitu RISPAM Pulau Timor, RISPAM Pulau Flores dan RISPAM Pulau Sumba. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2021, yaitu kerjasama dengan lembaga terkait.

❖ Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak

Indikator Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi



NTT Tahun 2019-2023. Realisasi Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak Tahun 2021 adalah sebesar 69,7% dari target 77%, sehingga capaian Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak Tahun 2021 sebesar 90,52%.

Untuk mendukung capaian indikator ini, pelaksanaan kegiatan di Tahun 2021 dengan mekanisme Tahun Jamak (dana pinjaman daerah), yaitu :

- a. Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Dange-Kampung Wae Rebo Kabupaten Manggarai.
- b. Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Fatumnasi Kabupaten TTS.
- c. Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Kampung Adat Parimaditha Kabupaten Sumba Timur.
- d. Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Koanara Kabupaten Ende.
- e. Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Mulut Seribu Kabupaten Rote Ndao.
- f. Pengadaan PSU beserta Sanitasi pada Destinasi Wisata Pantai Liman Kabupaten Kupang.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2021, yaitu kerjasama dengan lembaga terkait.

Sasaran Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi

Strategis 4 :

Sasaran 4 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.19 Capaian Indikator Kinerja							
Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Rasio Elektrifikasi	%	86,16	90	87,79	101,89	85	101,89
Capaian Sasaran					101,89		

Sumber data: LKIP Dinas ESDM Provinsi NTT, 2022

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)



maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Rasio Elektrifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebesar 87,79% poin ini meningkat sebesar 0,48 dari Tahun 2020 yaitu 87,31%. Hal ini disebabkan oleh karena :

1. Hibah bantuan meteran gratis bagi masyarakat tidak mampu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil verifikasi dan sinkronisasi data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Bappenas yaitu terkait data 3T dan Kementerian Sosial terkait BDT (Basis Data Terpadu).
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan belanja hibah instalasi sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu di 8 Kabupaten se Nusa Tenggara Timur sebanyak 320 unit.

Data Penerima Bantuan Meteran Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Data penerima bantuan meteran gratis bagi masyarakat yang tidak mampu Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KK PENERIMA
1.	Timor Tengah Selatan	60
2.	Timor Tengah Utara	35
3.	Ngada	35
4.	Manggarai Timur	40
5.	Sumba Tengah	35
6.	Sumba Barat	35
7.	Sumba Barat Daya	45
8.	Sabu Raijua	35
Total		320

Sumber data: LKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, 2022

Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah

Strategis 5 :

sasaran 5 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,01	75,13	74,21	98,77	75	98,77
Capaian Sasaran					98,77		

Sumber data: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2022



Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021 sebesar 75,21 poin dengan realisasi sebesar 74,21 poin. Capaian indikator ini sebesar 98,77% termasuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian ini dicapai melalui nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 58,28 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 82,45 poin, Indeks Tutupan Lahan sebesar 58,65 poin dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 87,07 poin.

Sasaran Menurunnya emisi gas rumah kaca

Strategis 6 :

Sasaran 6 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO ₂ ^{eq}	0	17.248.829	Belum dilaksanakan	0	17.248.829	17.248.829
Capaian Sasaran							

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2022

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca

Indikator Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2019-2023, sehingga Tahun 2021 indikator ini belum dilaksanakan.

Sasaran Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang

Strategis 7 : penataan ruang

Sasaran 7 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang	%	0	25,32	22,85	90,24	25,32	22,85
Capaian Sasaran					90,24		

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022



Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ **Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang**

Cakupan wilayah Provinsi dan Kab/Kota yang telah memiliki PERDA RUTR dan RDTR. Target tahun 2021 adalah 25,32 %. Total RDTR yang harus tersusun sampai dengan 2023 adalah sebanyak 35 buah RDTR pada 22 Kabupaten/Kota. Jumlah RDTR yang sudah memiliki Perda sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 8 Perda yaitu Perda RDTR : Kota Kalabahi Alor, Kota Kupang, Kota Soe, Kota Boking, Kota Ende, Kota Waebakul, Kota Waingapu, Kota Waiwerang, dan Kota Larantuka. Dengan demikian capaian sampai dengan 2021 adalah 22,85%. Asumsi kesesuaian fungsi dan pola ruang didasarkan pada ketersediaan Perda RDTR pada 22 Kabupaten/Kota. Kesesuaian fungsi dan pola ruang dapat tercapai jika seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki Perda RDTR sebagai dasar pemetaan untuk pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang.

Sasaran Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi
Strategis 8 : terhadap perubahan iklim

Sasaran 8 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.24 Capaian Indikator Kinerja							
Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Indeks Resiko Bencana	Poin	147	140	140,89	100,63	135	140,89
Capaian Sasaran					100,63		

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ **Indeks Resiko Bencana**

Target indikator sasaran Indeks Resiko Bencana Tahun 2021 sebesar 140 poin dengan realisasi sebesar 140,89 poin (data rilis Tahun 2020). Capaian indikator ini sebesar 100,63% termasuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian Indeks Risiko Bencana di dapat dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas



(capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan; pendidikan dan pelatihan; logistik; kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menjawab misi kepemilikan dokumen kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontigensi bencana baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Mitigasi dilakukan dengan pemasangan rambu-rambu peringatan dini lokasi rawan bencana, rambu jalur evakuasi dan titik kumpul baik pada lokasi rawan bencana maupun pada lokasi pariwisata. Sedangkan desa Tangguh bencana dimaksudkan untuk membangun pengurangan risiko bencana berbasis komunitas untuk mandiri dalam kesiapsiagaan, mitigasi serta kemampuan penanganan keadaan darurat skala desa serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Perhitungan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh BNPB untuk menghitung Indeks Risiko Bencana pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan dirilis setiap tahunnya. Namun tahun 2021 sampai saat ini belum di rilis.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian misi **“Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan”** sebesar **81,97%**, yang didukung dengan delapan sasaran dan 33 (tiga puluh tiga) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.611.378.246.369,00 dan realisasi Rp. 686.697.369.229,00 atau mencapai 42,62% sampai dengan akhir tahun.

Misi 4 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Misi Empat diukur dengan capaian pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Strategis 1 :

Sasaran 1 mencakup tiga (3) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:



Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Angka Melek Huruf	%	93,31	96,56	93,85	97,19	100	93,85
2.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	N/A	8,25	7,69	93,21	9,50	80,95
3.	Harapan Lama sekolah	Tahun	N/A	14,20	16,41	115,56	15	109,40
Rata-rata Capaian Sasaran						101,99		

Sumber data: BPS NTT Tahun 2022

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ Angka Melek Huruf

Melek Huruf adalah kemampuan seseorang membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya (selain huruf latin) yang masing-masing merupakan keterampilan dasar yang diajarkan di kelas-kelas awal jenjang pendidikan dasar. Angka Melek Huruf dihitung berdasarkan hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menggambarkan data tentang kesejahteraan rumah tangga yang merepresentasikan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang mencakup antara lain pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli.

Tabel 2.26
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2021

Kelompok Umur Age Group	Perkotaan Urban		Perdesaan Rurals		Perkotaan+Perdesaan Urban+Rural	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15–19	99,81	100,00	98,81	99,31	99,07	99,50
20–24	99,75	99,65	98,22	97,84	98,67	98,38
25–29	99,63	99,06	97,76	98,43	98,25	98,61
30–34	97,40	98,79	95,39	96,93	95,88	97,40
35–39	98,81	99,31	94,51	95,77	95,62	96,65
40–44	98,62	99,55	93,10	94,57	94,41	95,86
45–49	97,11	97,63	91,49	93,94	92,83	94,82
50+	92,71	92,96	80,39	80,82	83,12	83,59
Jumlah/Total	97,53	97,77	91,91	92,50	93,31	93,85

Sumber Data: BPS Provinsi NTT Tahun 2022



Berdasarkan SUSENAS 2021, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebesar 93,85 mengalami kenaikan (0,54) % dari Tahun 2020 yang mencapai 93,31. Data ini menunjukkan Provinsi NTT hingga Tahun 2021 belum terbebas dari buta aksara, masih terdapat 6,15 % penduduk di NTT yang belum dapat membaca dan menulis. Terlihat kontribusi terbesar berasal dari kelompok umur 50 tahun ke atas sebesar 83,59 %. Terdapat 16,41 % penduduk usia 50 tahun ke atas tidak dapat membaca dan menulis, sementara penduduk dengan usia 50 tahun ke atas sudah berada pada jenjang usia angkatan kerja bukan di jenjang usia sekolah.

Kecenderungan kelompok usia 50 tahun ke atas untuk “*relaps*” menjadi buta aksara permanen sangat besar. Hal ini tentu memberikan tantangan bagi pemerintah untuk memilih bentuk intervensi atau strategi yang kontekstual dan realistis dalam upaya mengurangi ketimpangan angka melek huruf sebesar 6,15 % di NTT dan atau mengejar angka melek huruf 100 persen di akhir periode RPJMD Tahun 2023. Misalnya memaksimalkan program kejar paket A yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT. Dengan catatan selama materi paket A cukup fungsional atau “*related*” pada aktivitas produktif sehari-hari dari peserta, maka harapan perbaikan bisa positif. Sementara bagi sebagian besar penduduk dengan kelompok umur lainnya yang telah “melek” huruf perlu dikembangkan program “*maintenance*” literasi secara berkala melalui pelatihan dan vokasi. Hal ini sangat kontekstual karena kapasitas literasi penduduk yang telah melek huruf akan mempengaruhi produktivitas kerjanya sekaligus mempengaruhi *income* per capita dan atau tingkat kesejahteraan keluarga.

❖ Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. RLS penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sebesar 7,69 tahun, atau mengalami kenaikan 0,3 dari tahun 2020 yang mencapai 7,63 tahun. Capaian ini merupakan kontribusi rata-rata lama sekolah semua kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Tabel 2.27
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk NTT
15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2020	2021	
Kabupaten				
1	Sumba Barat	6,60	6,84	0,24
2	Sumba Timur	7,12	7,32	0,20
3	Kupang	7,38	7,39	0,01
4	Timor Tengah Selatan	6,73	6,74	0,01
5	Timor Tengah Utara	7,81	7,96	0,15
6	Belu	7,35	7,36	0,01
7	Alor	8,41	8,42	0,01
8	Lembata	8,22	8,23	0,01
9	Flores Timur	7,71	7,72	0,01
10	Sikka	6,94	6,95	0,01
11	Ende	7,81	8,03	0,22
12	Ngada	8,52	8,53	0,01
13	Manggarai	7,37	7,61	0,24
14	Rote Ndao	7,59	7,71	0,12
15	Manggarai Barat	7,30	7,56	0,26
16	Sumba Tengah	6,25	6,47	0,22
17	Sumba Barat Daya	6,34	6,35	0,01
18	Nagekeo	7,89	7,90	0,01
19	Manggarai Timur	7,08	7,35	0,27
20	Sabu Raijua	6,65	6,66	0,01
21	Malaka	6,87	7,10	0,23
Kota				
1	Kota Kupang	11,58	11,6	0,02
Nusa Tenggara Timur		7,63	7,69	0,06

Sumber Data: BPS Prov. NTT Tahun 2022

Capaian RLS penduduk di NTT di 2020 sebesar 7.63 tahun telah menjadi 7.69 tahun dalam 2021 sebenarnya masih berada jauh di bawah standar 15 tahun yg di anjurkan PBB. Kenyataan ini konsisten dengan temuan bahwa angkatan kerja NTT di dominasi oleh lulusan SD. Ini berarti jumlah tamatan SD yang melanjutkan ke SMP juga tidak banyak sehingga kecenderungan ini akan mengerucut ke atas. Data ini menunjukkan adanya *gap* atau celah cukup besar di antara APK dan APM bagi anak dan pemuda di NTT yang harus diintervensi pemerintah. Terutama bagi kelompok usia yg dapat memenuhi 15 thn RLS di NTT. Hal lain yang lebih serius dari implikasi *gap* tersebut adalah kualitas lulusan yang akan memasuki dunia kerja atau meneruskan ke Perguruan Tinggi. RLS tentu tidak menjamin mutu dan kompetensi lulusan tetapi model interaksi dan intesifnya proses belajar-mengajar selama seseorang mengikuti suatu periode pendidikan termasuk mereka yang *drop out* (putus sekolah). Dengan



demikian mutu pembelajaran di semua jenjang dan jenis pendidikan NTT sangat menentukan “daya saing” anak usia sekolah di NTT untuk memasuki dunia kerja dan atau pendidikan lanjut terutama di luar NTT.

❖ Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Provinsi NTT pada tahun 2021 sebesar 13,20 tahun, naik 0,02 dibanding capaian tahun 2020 yaitu 13,18. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,20 tahun atau setara dengan Diploma I. Berikut ditampilkan perbandingan capaian HLS kabupaten/kota yang merupakan kontribusi bagi peningkatan HLS Provinsi NTT Tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.28
Harapan Lama Sekolah Penduduk NTT
15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2020	2021	
Kabupaten				
1	Sumba Barat	13,11	13,12	0,01
2	Sumba Timur	12,82	12,83	0,01
3	Kupang	13,85	13,86	0,01
4	Timor Tengah Selatan	12,57	12,58	0,01
5	Timor Tengah Utara	13,31	13,32	0,01
6	Belu	12,27	12,28	0,01
7	Alor	12,23	12,24	0,01
8	Lembata	12,42	12,43	0,01
9	Flores Timur	12,91	12,92	0,01
10	Sikka	13,16	13,43	0,27
11	Ende	13,78	13,79	0,01
12	Ngada	12,7	12,71	0,01
13	Manggarai	13,41	13,69	0,28
14	Rote Ndao	13,18	13,19	0,01
15	Manggarai Barat	12,28	12,29	0,01
16	Sumba Tengah	12,96	13,04	0,08
17	Sumba Barat Daya	13,06	13,07	0,01
18	Nagekeo	12,48	12,49	0,01
19	Manggarai Timur	11,99	12,26	0,27
20	Sabu Raijua	13,14	13,15	0,01
21	Malaka	12,78	12,79	0,01
Kota				
1	Kota Kupang	16,4	16,41	0,01
Nusa Tenggara Timur		13,18	13,20	0,02

Sumber Data: BPS Prov. NTT Tahun 2022



Angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan dua komponen utama penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mewakili dimensi pendidikan. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA di NTT mengalami peningkatan. Secara langsung, ketika tingkat kelulusan SD, SMP dan SMA meningkatkan maka angka HLS dan RLS yang merupakan dua indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan tingkat kelulusan SMA melalui berbagai program dan kegiatan tahun anggaran 2021 sebagaimana dijelaskan secara rinci pada point 2.2. urusan pendidikan. Selain itu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan kolaborasi dengan Kabupaten/Kota di NTT untuk meningkatkan tingkat kelulusan SD dan SMP.

Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Strategis 2 :

Sasaran 2 mencakup tiga (3) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,01	68,1	67,15	98,60	69	97,32
2.	Prevelensi Stunting	%	24,2	21,8	20,9	104,13	10-12	25,83
Rata-rata Capaian Sasaran						101,37		

Sumber data: BPS Provinsi NTT Tahun 2022 dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2022

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus sebagai indikator dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan terus hidup atau rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang Tahun ke-X. UHH masyarakat Nusa Tenggara Timur tahun 2021 adalah 67,15 tahun atau mencapai 97,32 % dari target akhir RPMJD yaitu 69 tahun. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan Usia



Harapan Hidup melalui program peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada point b. analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada program dan kegiatan dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai.

❖ Usia Harapan Hidup

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Capaian prevelensi stunting di Provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir mengalami perbaikan signifikan seiring dengan berbagai upaya kolaborasi dengan multi level pemerintahan dan multi stakeholder. Prevelensi stunting tahun 2021 di Provinsi NTT adalah 20,9% atau mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 3,3 % dibanding capaian tahun 2020 yaitu 24,2%. Namun capaian ini masih jauh dari target akhir RPJMD yakni 10-12 %, artinya perlu mengejar gap minimal 8,9 % di tahun 2022 dan 2023. Sama halnya dengan indikator Usia Harapan Hidup, sasaran ini diintervensi melalui program peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan sebagaimana telah dijelaskan pada 2.2 urusan Kesehatan.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Prestasi
Strategis 3 : Keolahragaan

Sasaran 3 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.30.
Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Cakupan pembinaan Kepemudaan dan keolahragaan	%	50	60	71,08	120	80	89
Capaian Sasaran					120		

Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.NTT Tahun 2022



Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ Cakupan pembinaan Kepemudaan dan keolahragaan

Peran Pemuda dalam pembangunan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2020 jumlah asosiasi kepemudaan yang dibina oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 50 OKP. Pembinaan organisasi kepemudaan tahun 2021 tidak dilaksanakan karena tidak ada intervensi anggaran, sehingga tidak ada penambahan jumlah OKP yang dibina tahun 2021 atau tetap berjumlah 50 OKP berdasarkan jumlah realisasi terakhir di tahun 2020. Rincian program yang mendukung capaian sasaran ini sebagaimana telah diuraikan secara rinci pada poin 2.2. urusan kepemudaan dan olahraga. cabang olahraga (CABOR) yang dibina pada tahun 2021 berjumlah 9 Sedangkan untuk CABOR, sehingga total OKB dan CABOR yang dibina adalah 59. Adapun total OKP dan CABOR yang menjadi target pembinaan berjumlah 83, dengan rincian total asosiasi kepemudaan 70 dan total cabang olahraga 13 CABOR. Dengan demikian cakupan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan tahun 2021 mencapai 71,08.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian misi **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”** sebesar **95,56%**, yang didukung dengan tiga sasaran dan 4 (empat) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.074.804.418.134,00 dan realisasi Rp. 1.922.650.202.618,00 atau mencapai 92,67% sampai dengan akhir tahun.

Misi 5 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Misi Lima diukur dengan capaian pada 1(satu) sasaran sebagai berikut:



Sasaran **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan**
Strategis 1 : **Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel,**
 transparan serta partisipatif

sasaran 1 mencakup tujuh (7) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.31. Capaian Indikator Kinerja								
No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2020	2021			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60.37	65	60.78	93.51	71	85.61
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	63.43 (B)	80 (A)	63.70 (B)	79.63	80 (A)	79.63
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3.26	2.3	2.28	99.13	2.7	84.44
5.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	59.65	50	88.38	176.76	75	117.84
6.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik/IKM	Poin	83.80	85	86.39	101.64	90	93.06
7.	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	81.02	82.40	77.29	93.80	83	93.12
Rata-rata Capaian Sasaran						106.35		

Sumber data: Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Badan Keuangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

❖ **Indeks Reformasi Birokrasi**

Nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sebesar 60.78 poin meningkat 0.41 poin dibandingkan tahun 2020 sebesar 60.37 poin. Komponen pembentukan penilaian indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: Kegiatan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen Perubahan:
 - a. Telah merevisi rencana aksi Road Map RB Provinsi NTT 2018-2022
 - b. Melakukan PMPRB semester I dan II Tahun 2021
 - c. Membuat dan menerapkan website Reformasi Birokrasi Provinsi NTT <http://rb.nttprov.go.id/>
 - d. Publikasi Road Map dan kegiatan seputar RB melalui media sosial



2. Deregulasi Kebijakan:

Melaksanakan program deregulasi kebijakan dan peraturan perundangan (Prompemperda di Biro Hukum)

3. Kelembagaan:

- a. Telah melakukan penyederhanaan, penyetaraan dan pelantikan pejabat fungsional sebanyak 333 orang pada tanggal 31 Desember tahun 2021
- b. Telah menyusun Pergub SOTK dan penyesuaian mekanisme/proses bisnis
- c. Jabatan administrasi yang disetujui disederhanakan sebanyak 874 jabatan yang terdiri dari: sebanyak 356 jabatan administrasi pada unit kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan. Sebanyak 518 Jabatan Pengawas (Kasubag Tata Usaha) pada UPTD Satuan Pendidikan Formal (SMA/SMK/SLB)

4. Tata Laksana:

- a. Penerapan tata naskah dinas elektronik (e-Nadi)
- b. Penetapan Keputusan Gubernur tentang SOP-Administrasi Pemerintahan bagi 38 Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Draft Keputusan Gubernur NTT tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi NTT
- d. Penyusunan Keputusan Gubernur NTT tentang Peta Proses Bisnis pada 20 Perangkat Daerah
- e. Penerapan aplikasi telekonsultasi/pendampingan fasilitasi tim kerja RB melalui aplikasi telekonsultasi
- f. Uji coba pengarsipan digital melalui aplikasi SRIKANDI

5. SDM:

- a. Membentuk dan memaksimalkan fungsi assessment center dengan melakukan tes kompetensi secara bertahap kepada seluruh ASN
- b. Penerapan kebijakan Manajemen Kinerja (Pergub 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Kinerja)



- c. Pembuatan instrument kebijakan menuju talent pool dengan menetapkan Pergub No.67/2021 tentang Manajemen Talenta, Pergub No.65/2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Sosial Kultural dan Pergub No.76/2021 tentang SKJ Pimpinan Tinggi.
- d. Penetapan Keputusan Gubernur tentang Anjab ABK di 39 Perangkat Daerah, 83 UPTD/Cabang Dinas, 278 Satuan Pendidikan Formal (SMA), 107 SMA dan 15 SLB dalam proses penginputan dan validasi

6. Akuntabilitas:

- a. Melakukan revisi dokumen perencanaan kinerja (PK)
- b. Menyusun cascading kinerja tindak lanjut Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021
- c. Melakukan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- d. Pembuatan aplikasi e-Reporting untuk memonitoring capaian kinerja organisasi secara berkala (triwulan)

7. Pengawasan:

- a. Menerapkan SPIP terintegrasi
- b. Memperbarui kebijakan penanganan Gratifikasi dengan Pergub Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
- c. Membuat aplikasi e-Sidak untuk penanganan WBS
- d. Penetapan Kebijakan tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Pergub No.60/2020)
- e. Melibatkan APIP dalam berbagai proses kebijakan (perencanaan dan pembinaan bukan hanya pengawasan)
- f. Menerapkan manajemen ISO 9001 Tahun 2015
- g. Deklarasi dan Pembangunan Zona Integritas
- h. Persiapan mengusulkan Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM penilaian Tahun 2022 mendatang
- i. Pokja RB Provinsi telah melakukan pendampingan terintegrasi melalui klinik telekonsultasi RB.



8. Pelayanan Publik:

- a. 39 Perangkat Daerah telah menggunakan aplikasi pengaduan masyarakat (SP4N LAPOR), terdapat 22 pengaduan tahun 2021 ; 20 pengaduan telah ditindaklanjuti dan 2 dalam proses Tindak Lanjut oleh Perangkat Daerah terkait (Dinas P dan K dan Dinkesdukcapil)
- b. Mendorong unit pelayanan langsung untuk membangun sistem pemberian kompensasi (e-delivery di Samsat Kota)
- c. 39 Perangkat Daerah dan 24 Cabang Dinas/UPT telah menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, 1 UPT dalam proses finalisasi.
- d. Pengembangan Inovasi daerah melalui kompetisi Inovasi Government Award (IGA)

❖ Opini BPK

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 91.A/LHP/XIX.KUP/05/2021.

❖ Nilai Akuntabilitas Kinerja

Komponen penilaian SAKIP dengan rincian pada tabel berikut:

Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja, yaitu:

1. Revisi RPJMD, Renstra, IKU dan dokumen perencanaan kinerja (PK pada Eselon II) agar indikator yang tercantum berorientasi pada hasil/*outcome*.
2. Melakukan Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Pembuatan rancangan aplikasi e-Reporting untuk memonitoring capaian kinerja organisasi secara berkala (triwulan)



4. Menyusun *logical frame* antara Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah pada RPJMD Bab V-12 dan selaras dengan indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTT.
5. Pembinaan SAKIP pada 18 Kabupaten/Kota, yakni: Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Malaka, Kab. Kupang, Kota Kupang, Kab. Alor, Kab. Rote, Kab. Flotim, Kab. Ende, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat dan Sumba Tengah.

❖ Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sebesar 2.28 poin menurun 0.98 poin dibandingkan tahun 2020 sebesar 3.26 poin.

Kegiatan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan Indeks Pemerintah Berbasis Elektronik, yaitu:

1. Pembentukan Tim Tinggi Provinsi NTT untuk mengkaji penilaian
2. Penyusunan Arsitektur SPBE
3. Melakukan sosialisasi indikator penilaian
4. Melakukan evaluasi internal

❖ Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sebesar 88.38 meningkat 28.73 dibandingkan tahun 2020 sebesar 59.65. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2021 menorehkan hasil yang sangat memuaskan dengan predikat “menuju informatif” berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat. Kegiatan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTT, yaitu:

1. Komitmen dan kesadaran pimpinan dalam menentukan arah kebijakan dan penerapan isu keterbukaan informasi publik di dalam program dan kegiatan
2. Kegiatan publikasi program-program pemerintah secara rutin dilakukan melalui kegiatan komunikasi informasi, edukasi dan motivasi publik melalui berbagai kanal informasi yaitu:
 - a. Website ntt.prov.go.id dan website ppid
 - b. Melakukan dialog interaktif melalui radio dan televise
 - c. Melalui media sosial dan media luar ruang



d. Data/informasi yang secara rutin dan berkala dipublikasikan adalah data/informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, benar, up to date dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

❖ Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebesar 86.32 poin meningkat 2.59 poin dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 83.75 poin.

IKM Pemerintah Provinsi NTT merupakan rata-rata dari seluruh penilaian IKM yang dilakukan pada Unit Pelayanan/Perangkat Daerah. Penilaian IKM tersebut dilakukan pada 9 (sembilan) unsur pelayanan yaitu: Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif Pelayanan, Produk Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan.

Tabel 2.32.
Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2020

No	Unit Pelayanan/Perangkat Daerah	IKM unit Pelayanan	Mutu Pelayanan
1.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	81.42	B (BAIK)
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87.75	B (BAIK)
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.02	B (BAIK)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jenis Layanan Pengujian Material	77.17	B (BAIK)
5.	UPTD Pengelola Sarana Teknis Perhubungan Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, dan Kab. Alor Jenis Layanan Ijin Trayek	83.54	B (BAIK)
6.	UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang	79.70	B (BAIK)
7.	UPTD Veteriner Jenis Layanan Perawatan Kesehatan Hewan	82.86	B (BAIK)
8.	UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Jenis Layanan Pemeriksaan Laboratorium	88.30	A (SANGAT BAIK)
9.	UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	89.03	A (SANGAT BAIK)
10.	RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	82.00	B (BAIK)
	Nilai IKM Pemerintah Provinsi	83.75	B (BAIK)

Sumber data: Biro Organisasi Setda Prov. NTT Tahun 2021

Tabel 2.33.
Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021

No	Unit Pelayanan/Perangkat Daerah	IKM unit Pelayanan	Mutu Pelayanan
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.32	B (BAIK)
2.	UPTD Pendapatan Kota Kupang pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah	80.34	B (BAIK)
3.	RSUD W.Z.Johannes Kupang	83.56	B (BAIK)
4.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	94.88	B (BAIK)
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	91.58	B (BAIK)
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77.17	B (BAIK)
7.	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor pada Dinas Perhubungan	83.54	B (BAIK)
8.	UPTD Veteriner pada Dinas Peternakan	84.85	B (BAIK)
9.	UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan	87.24	A (SANGAT BAIK)
10.	UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	88.40	A (SANGAT BAIK)
	Nilai IKM Pemerintah Provinsi	86.39	B (BAIK)

Sumber data: Biro Organisasi Setda Prov. NTT Tahun 2022



❖ Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebesar 77.29 poin menurun 3.73 poin dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 81.02 poin.

Tabel 2.34.

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT Tahun 2020

No	Aspek Demokrasi	Capaian
1.	Kebebasan Sipil	90.59
2.	Hak-hak politik	75.61
3.	Kelembagaan Demokrasi	63.23
	IDI NTT (seluruh aspek)	77.29

Sumber data: BPS Provinsi NTT Tahun 2020

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian misi **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”** sebesar **105,91%**, yang didukung dengan satu sasaran dan 4 (empat) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.074.804.418.134,00 dan realisasi Rp. 1.922.650.202.618,00 atau mencapai 86,46% sampai dengan akhir tahun.